

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA, ANALISIS DATA, DAN INTERPRETASI TEORITIK**

Pada bab ini akan dilakukan penyajian atas data yang telah diperoleh peneliti di lapangan yang disertai dengan analisis dan interpretasinya karena dengan cara ini akan diperoleh jawaban akan rumusan masalah penelitian. Data yang diperoleh berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi karena dengan cara inilah metode pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan. Di samping itu, penelitian deskriptif juga menghendaki adanya gambaran yang cermat dan rinci mengenai suatu fenomena sehingga memungkinkan penyajian, analisis dan interpretasi data dijadikan dalam satu bab agar data yang disajikan dapat dikemas dengan rapi sehingga memudahkan proses penyimpulan.

Sebelumnya, pada bab ini akan disajikan data yang telah diperoleh di lapangan. Penyajian data menurut Miles dan Huberman dimaknai sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Data yang telah disajikan kemudian dianalisis yaitu proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya ke dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kegunaan analisis adalah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Setelah disajikan

dan dianalisis, maka data akan diinterpretasikan sesuai dengan acuan teori yang digunakan dalam penelitian. Interpretasi atau menafsir berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis. Dari hasil analisis tersebut akan dikorelasikan dengan teori dan juga dikaitkan dengan konteks penelitian yang dikaji agar tidak terjadi subyektivitas peneliti.

Sebuah laporan penelitian akan menjadi lebih baik, apabila data yang disajikan terurai dengan jelas dan memiliki keterkaitan logis yang runtut antara penyajian, analisis dan interpretasi sehingga memudahkan pembaca untuk memahami penjelasan dari laporan penelitian yang telah disampaikan.

### **III.1 Penyajian Data**

Pada bagian ini akan disajikan data yang telah diperoleh selama penelitian di lapangan mengenai Partisipasi Pria Dalam Program KB di Kecamatan Pakal. Data telah dikumpulkan dengan metode wawancara, kemudian dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggabungkan data hasil dari ketiga metode ini untuk kemudian diperbandingkan dan disusun secara runtut.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* yang kemudian berkembang menjadi *snowball*. Purposive sampling yang menghendaki subjek yang dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Mereka dipilih karena dipercaya mewakili satu populasi tertentu. Setelah itu, berkembang ke informan selanjutnya yang dianggap informan kunci sebagai

informan yang memiliki pengetahuan memadai tentang konteks penelitian. Peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian atas karakteristik anggota sampel yang dengannya diperoleh data yang sesuai dengan maksud penelitian.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Suharto, yaitu informan kunci yang dianggap telah lama dan intensif menyatu sekaligus tokoh penggerak program KB pria di Kecamatan Pakal. Kemudian dari informan kunci, peneliti mendapatkan informan lain yang relevan dengan konteks penelitian yaitu Karisun, Ahmad Wardoyo, Harold dan Abd Wachid selaku akseptor sekaligus kader motivator KB pria bagi Kecamatan Pakal. Setelah itu, selain mendapatkan informasi dari kelima informan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara lebih lanjut terhadap pihak pelaksana Program KB sebagai konfirmasi atas jawaban informan diatas. Dalam hal ini informan berasal dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, Bapemas KB Surabaya serta Pejabat Kecamatan Pakal. Informan yang dianggap paling tahu dan memiliki informasi yang cukup tentang konteks penelitian dalam intansi tersebut adalah Agus Setyoko selaku Camat Pakal, Drs. Junianto selaku Kepala Bidang KB Bapemas Kota Surabaya, Dr. Sufyan Rizalanda selaku Kepala Bagian KB BKKBN Propinsi Jawa Timur, Muji Prihartini selaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Toni selaku Koordinator PLKB. Keseluruh informan tersebut dipilih berdasarkan alasan kecakapan dan kemampuan untuk memberi informasi yang cukup tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu Partisipasi Pria dalam Program KB di Kecamatan Pakal.

### **III.1.1 Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Pakal**

#### **III.1.1.1 Definisi Keluarga Berencana**

Program Keluarga Berencana merupakan program dan kebijakan pemerintah yang digulirkan sejak tahun 1968 dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk. Namun pemaknaan keluarga berencana sejauh ini seringkali dimaknai sekedar penggunaan kontrasepsi guna membatasi jumlah kelahiran dan jumlah anak dalam keluarga. Peneliti dalam konteks ini telah mendapatkan jawaban dari beberapa informan terkait makna dari program Keluarga Berencana termasuk menurut pelaksana program KB, hingga makna sebenarnya menurut Undang-undang. Seperti yang dijelaskan oleh Drs. Djunianto dari Bapemas KB Surabaya yaitu :

“Jadi sebetulnya masyarakat itu kan taunya praktis aja. Kalo orang umum bilang salah kaprah, kalo saya sendiri bilang mereka mikirnya praktis ya. Kalo anak muda bilang whatever lah gitu. Apapun itu lah yang penting KB identik dengan alat kontrasepsi. Padahal sebenarnya kan enggak. KB itu luas, jangkauannya luas, artinya kita bisa bicara banyak hal di KB. Selain pelayanan kita juga bicara tentang penundaan usia perkawinan, kita juga bicara tentang ketahanan keluarga, kita juga bisa bicara tentang kesejahteraan keluarga, sehingga lingkupnya KB itu sebetulnya ya itu tadi empat hal itu empat pilar itu. Jadi kalo ada yang menyebut KB itu kontrasepsi itu hanya sebagian kecil ya maklumlah kalo masyarakat bilang seperti itu karena memang porsi yang paling banyak diantara pilar itu ya program kontrasepsi itu saya rasa masyarakat juga perlu sedikit diberi edukasi ato pelajaran semacam penyebarluasan informasi tentang program KB sesungguhnya itu apa.”

Drs. Djunianto menjelaskan bahwa diperlukan edukasi bagi masyarakat tentang makna program KB yang sesungguhnya. Menurut Drs. Djunianto pemaknaan program KB di masyarakat selama ini kurang tepat. Masyarakat selalu mengidentikkan program KB dengan kontrasepsi. Padahal, ruang lingkup Program KB tidak hanya dalam pelaksanaan dan sosialisasi penggunaan kontrasepsi saja namun juga mencakup program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Pernyataan Drs. Djunianto di atas diperkuat oleh Dr. Sufyan dari BKKBN :

“Ini menurut undang-undang yang baru, nomor 52 tahun 2009, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Disitu disebutkan bahwa BKKBN, badan yang menangani KB sekarang diubah menjadi badan kependudukan dan keluarga berencana. Nah, dari situ secara umum bahwasannya program kb itu tidak melulu meliputi kontrasepsi, tapi sekarang sudah masuk unsur-unsur tentang kependudukan. Nah, permasalahan kependudukan bagaimana cara kita menganalisis dan segala macam. Dan juga pendamping program KB itu sendiri ada juga program lain ya KS namanya atau disebut Keluarga Sejahtera dimana ini adalah para peserta KB yang kemudian kita bina dengan berbagai macam kelompok ya, mulai dari kelompok ibu-ibu yang punya balita dan yang punya remaja punya lansia dan lain sebagainya. Semuanya itu bertujuan supaya keluarga yang ikut KB itu bisa sejahtera. Nah disamping itu tentu ada bagian-bagian lain misalnya kesekretariatan dan juga bagian tata dan informasi termasuk juga untuk advokasi dan KIE. Itu secara umum.”

Dr. sufyan menambahi pernyataan Drs. Djunanto sebelumnya bahwasannya program Keluarga Berencana tidak hanya dimaknai dan diwujudkan hanya dalam program kontrasepsi saja melainkan juga program-program yang terkait unsur-unsur kependudukan. Menurut Dr. sufyan program keluarga berencana juga memiliki program pendamping yang disebut dengan program keluarga sejahtera yang dalam

realisasinya diwujudkan dalam bentuk pembinaan kesejahteraan dan ketahanan kepada setiap unit keluarga. Semua program tersebut dilakukan secara bersamaan agar tidak hanya berdampak pada terkendalinya penduduk secara kuantitas saja namun juga tercipta kesejahteraan di tiap unit keluarga.

Selanjutnya Agus Setyoko selaku Camat Pakal juga mengutarakan pendapat yang sama tentang Program KB:

“Jadi gini, jadi konsep bapemas itu... kan pernah diskusi sama PLKB, saya kan orang kecamatan, sebelum saya disini, ketika saya di tempat lain, sakjane itu ya PLKB itu kan focus nang KB tok gitu lho, kenopo saiki ngurusi warga miskin, ngurusi UMKM, akhire kan maleh gak focus, nah saya sempat berpikir gitu, itu ketika saya jadi sekcab, terus saya dibilangi gini pak sek, sekarang itu lebih melebar, jadi bukan KB nya yang jadi titik focus, tapi agak melebar, jadi akarnya, akarnya itu yang dilihat, akarnya itu kan sebenarnya kan warga itu kan punya banyak anak itu kan warga yang menengah ke bawah nah disinilah peran tadi itu pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi. Makanya disitu ada yang namanya UKM- UKM. Jadi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat gitu jadi itu yang diberdayakan dengan harapan kalo dia itu ada kesibukan jadi itu yang bisa menekan agar dia nggak banyak anak, arahnya kesitu. Jualannya standart kok, pelatihan-pelatihan misalnya pembuatan roti dengan harapan dia bisa buat jajan, lalu dijual di sekolah sekolah atau kemana lah dengan harapan pendapatannya nanti meningkat. Akhirnya nanti kalo ekonominya meningkat pendapatan meningkat otomatis kan insya allah kesejahteraannya meningkat kan gitu.”

Agus setyoko selaku camat pakal, mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda dengan informan lainnya. Agus mengutarakan bahwa disamping pelayanan kontrasepsi, program KB di kecamatan pakal dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sekitar dengan pembinaan masyarakat berbasis ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan harapan masyarakat memiliki kesibukan sehingga kesempatan

untuk memiliki anak lebih banyak menjadi berkurang. Selain itu dengan adanya pembinaan kesejahteraan masyarakat menjadi memiliki bekal keterampilan yang dapat dijadikan mata pencaharian.

Hal ini juga diperjelas dengan penjelasan Muji prihartini selaku PLKB kecamatan pakal :

“oh gini ya mbak, memang orang-orang itu taunya KB itu kontrasepsi, tapi gini mbak, memang kegiatan KB yang utama itu kontrasepsi karena ini memang yang utama maksudnya yang secara nyata bisa mengurangi alias mengendalikan jumlah penduduk, core nya ya intinya, lha kalo nggak jumlah penduduknya dulu yang dikendalikan mana bisa mbak memberdayakan orang segitu banyaknya makanya jumlahnya dikendalikan dulu setelah itu baru diberdayakan. Kita punya program-program pemberdayaan yang masih masuk dalam lingkup KB ya seperti BKB BKR lansia juga itu mbak selain itu juga ada pelatihan-pelatihan bikin kerajinan yang selanjutnya bisa mereka jual yang setelah itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatan mereka namanya itu UPPKS. Ya bener mbak kalo ada orang bilang KB itu kontrasepsi nggak salah karena porsi dalam program KB yang paling banyak dan paling utama dilakukan adalah kontrasepsi karena biar penduduknya terkendali seperti itu.”

Muji selaku petugas lapangan keluarga berencana yang bertugas di kecamatan pakal menjelaskan hal yang hampir sama dengan informan lainnya mengenai makna program KB yang sebenarnya. Muji menjelaskan bahwa program KB memiliki tujuan utama yaitu mengendalikan penduduk yang diwujudkan dalam program pelayanan kontrasepsi sebagai inti dari program KB. Selanjutnya, muji mengatakan bahwa setelah dilaksanakan kontrasepsi maka langkah selanjutnya adalah memberdayakan setiap unit keluarga. Program pemberdayaan yang masih termasuk dalam lingkup KB

menurut muji diantaranya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan program peningkatan pendapatan keluarga yaitu UPPKS.

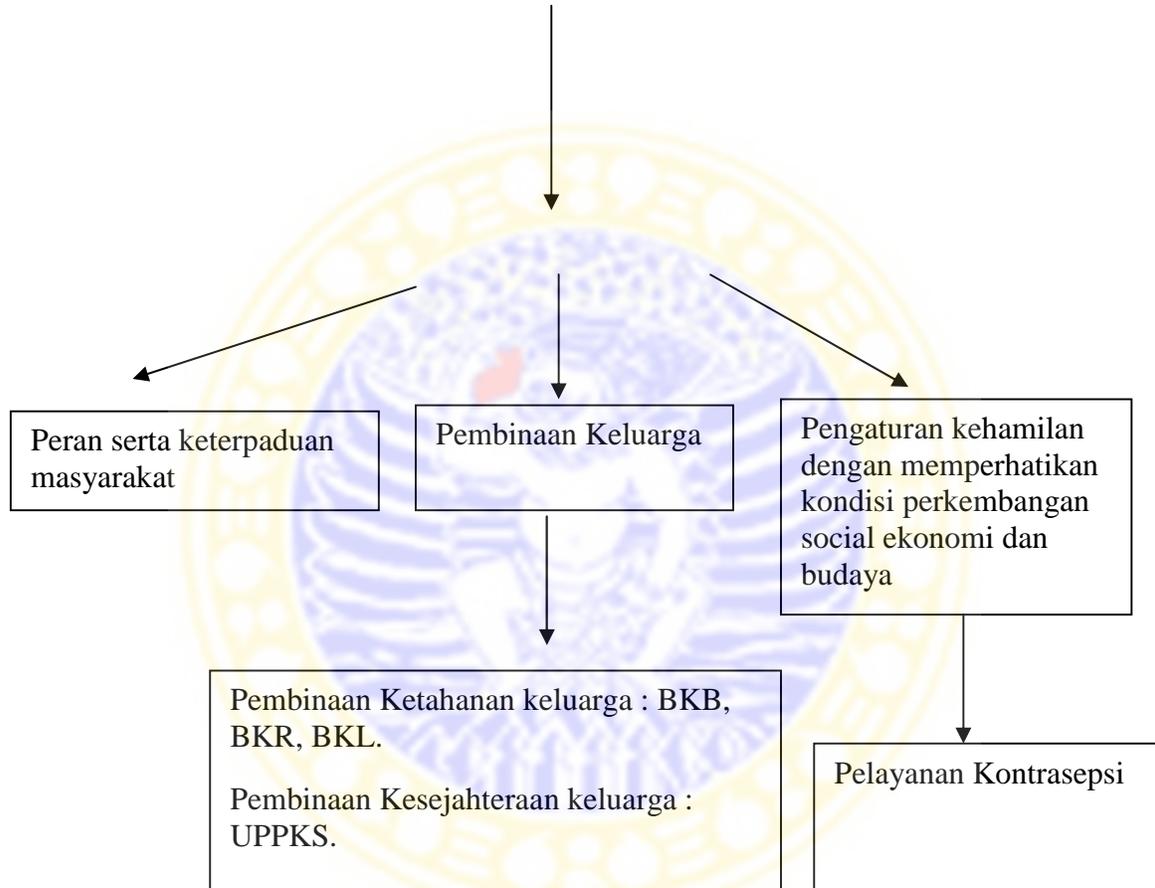
Dari penjelasan yang disampaikan oleh narasumber diatas mengungkapkan bahwasannya program KB memiliki jangkauan yang luas dan bersifat holistik, dalam arti, KB tidak hanya dimanifestasikan dalam wujud penggunaan kontrasepsi saja, akan tetapi lebih meluas pada upaya peningkatan dan pengembangan kualitas setiap unit keluarga di Indonesia. Disamping kontrasepsi, mereka juga dibina dan diberdayakan dengan mengikutsertakan seluruh anggota keluarga mereka baik suami/istri, balita remaja dan lansia yang termasuk dalam anggota keluarga akseptor.

Dalam program KB, setelah partisipan kontrasepsi menjadi akseptor, selanjutnya akan dilakukan pembinaan keluarga. Pembinaan keluarga dalam bidang ketahanan diwujudkan dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), dimana dilakukan pembinaan, penyuluhan dan pemeliharaan kesehatan bagi para peserta. Sedangkan dalam pembinaan kesejahteraan direalisasikan dalam program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang diwujudkan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil bagi setiap unit keluarga. Tujuan dari diselenggarakannya program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberi bekal bagi masyarakat untuk memperbaiki status sosial dan ekonomi setiap unit keluarga khususnya di wilayah kecamatan pakal.

Penjelasan beberapa informan diatas telah merujuk pada Undang Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa untuk mewujudkan penduduk yang seimbang, dilakukan upaya pengendalian penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang kesemuanya itu dikemas dalam program Keluarga Berencana. Program Keluarga berencana menurut Pasal 1 Undang Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selanjutnya, pada Pasal 22 disebutkan bahwasannya program Keluarga Berencana dilakukan dengan upaya : (1) peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat; (2) pembinaan keluarga; (3) pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan social ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

### Gambar 3.1 Upaya Pelaksanaan Program Keluarga Berencana

Undang Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Program Keluarga Berencana dilakukan dengan upaya



Sesuai bagan diatas, program Keluarga Berencana memiliki jangkauan pelaksanaan yang luas, KB tidak hanya mengupayakan penggunaan kontrasepsi untuk membatasi kelahiran anak guna mengendalikan jumlah penduduk saja, namun juga

terfokus pada upaya-upaya membina setiap unit keluarga dalam hal ketahanan juga kesejahteraan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk, mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas.

Dapat disimpulkan dari beberapa uraian di atas, pelaksana program KB telah menyampaikan pemahamannya tentang Keluarga Berencana yang merujuk dan sesuai pada Undang Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pihak pelaksana KB telah memahami dan menjalankan program keluarga berencana sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

### **III.1.1.2 Pemaknaan program KB di Masyarakat**

Selain kepada pihak pelaksana, untuk mendapatkan verifikasi data yang seimbang peneliti juga berusaha memperoleh keterangan mengenai pemahaman program KB dari pihak masyarakat dalam hal ini akseptor atau pengguna kontrasepsi pria yang relevan dengan judul dan topik dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mendapatkan jawaban dari lima orang informan pria yaitu Suharto, Ahmad Wardoyo, Karisun, Harold dan Abdul Wachid. Ahmad Wardoyo mengungkapkan pemahamannya tentang program KB sebagai berikut :

“ya boleh juga untuk meningkatkan kesejahteraan”

Ahmad Wardoyo mengungkapkan pemahamannya tentang program KB secara sederhana program yang diselenggarakan pemerintah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain wardoyo, Abd wachid juga mengungkapkan :

“Program KB..ehmmm kalo pengertian saya ya program KB itu apa ya semacam usaha pemerintah gitu untuk mengendalikan jumlah penduduk gitu mbak, ya istilahnya opo orang di-KB itu kan diatur jumlah anak itu ya demi kesejahteraan keluarga mereka juga, ya gitu lah kurang lebih yang saya tau”

Tidak jauh berbeda dengan Ahmad Wardoyo, Abd Wachid mengungkapkan pengetahuannya tentang program KB sebagai usaha pemerintah untuk menekan jumlah penduduk demi terciptanya kesejahteraan bersama. Usaha ini dilakukan dengan cara mengatur jumlah anak dalam keluarga agar tercipta kesejahteraan dalam keluarga.

Pendapat Ahmad Wardoyo dan Abd Wachid ini tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Suharto yaitu :

“oh KB pria secara umum itu suatu upaya pengendalian jumlah penduduk gitu lah mbak ya, apa ya...bisa memperkecil populasi penduduk gitu lah, terus yang saya lihat dari masyarakat ini kalo diterusiin nanti ya akhirnya ya jadi tambah banyak penduduknya gitu ya mbak”

Suharto memaknai program KB sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk oleh pemerintah dengan tujuan memperkecil populasi penduduk. Suharto menambahkan program KB sangat penting dilakukan mengingat jumlah penduduk

yang akan terus bertambah dan semakin tak terkendali apabila tidak dikendalikan dengan program KB.

Sedangkan beberapa informan lain memberikan penjelasan yang lebih rinci dan detail yang mereka pahami tentang program KB seperti yang diungkapkan oleh Karisun :

“Gini lo.. kalo setau saya ehmm tujuan pemerintah untuk mengadakan program KB laki-laki itu tidak lain ya untuk kesejahteraan keluarga katakan setiap orang itu diberi maksimal anak tiga cukup atau anak dua cukup itu memang bagus program itu, lagi tahun-tahun yang sekarang ini kan apa kalo anak banyak. Sekarang ini lho terus terang aja, kalo punya anak tiga delapan tujuh kayak orang dulu ya biayanya banyak juga, anak banyak punya hape banyak, anak banyak punya sepeda motor banyak, itu sudah tuntutan jaman sekarang. Jadi kalo ada KB laki-laki seperti itu saya sangat berterimakasih dan mendukung sekali. Lebih-lebih untuk warga yang kiranya ekonominya agak lemah, katakanlah ekonomi menengah ke bawah. Jadi itulah kurang lebih saya punya pemikiran. Andai kata ada lagi ya seperti pak Suharto (ketua paguyuban) ini ya harus cari disini itu kan orangnya sebagai kader atau pengurus yang bisa mengajak orang orang kesana.”

Karisun mengungkapkan pengetahuannya yang lebih detail tentang program KB, yaitu suatu program yang diselenggarakan pemerintah untuk kesejahteraan keluarga. Karisun mengkaitkan program KB dengan keadaan dan kemampuan ekonomi setiap keluarga yaitu semakin banyak jumlah anak dalam keluarga maka semakin banyak pula beban ekonomi dalam keluarga. Sehingga menurut Karisun, program KB memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan terlebih pada era masa kini.

Pendapat Karisun juga Diperkuat oleh Harold :

“KB itu penting untuk perencanaan keluarga ke depan yah, jadi sebaiknya sebelum orang menikah itu ehh.. dia musti penting untuk mengetahui hal itu gitu.jadi untuk kedepannya dia bisa yaa ibarat negara ya mau dibawa kemana nih negara, kedepan ini keluarga mau gimana gitu. Jangan nanti sudah dijalani sudah punya anak banyak baru mikir kok nggak KB dulu ya. Nah itu kan keliru gitu ya itu. Jadi konteks ini sudah mulai ngomong soal kedepannya keluarga kita kayak apa.”

Berbeda dengan yang lain, Harold menjelaskan jika berbicara mengenai program KB maka berkaitan dengan perencanaan keluarga untuk masa depan. Menurut Harold, KB adalah perencanaan keluarga di masa mendatang yang secara langsung berkaitan dengan perencanaan jumlah penduduk suatu negara. Maka dari itu, menurut Harold perencanaan keluarga dan KB perlu dilakukan bahkan mulai sebelum menikah.

Dari hasil wawancara dengan lima orang informan yang merupakan warga dan akseptor KB di kecamatan pakal tiga diantaranya yaitu Ahmad wardoyo dan Abd wachid, dan Suharto memberikan pemahaman yang sederhana mengenai program KB. Ahmad Wardoyo, Abd. Wachid dan Suharto menjelaskan bahwa program KB adalah program untuk mengendalikan jumlah anak dalam keluarga yang ditujukan untuk mengendalikan jumlah penduduk secara umum demi kesejahteraan masyarakat. Menurut ketiga informan tersebut, KB sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan dan keadaan ekonomi setiap keluarga. Sedangkan Karisun dan Harold menyatakan adanya pengetahuan dan pemahaman yang lebih rinci tentang program KB. Mereka memahami program KB sebagai program jangka panjang yang dapat mewujudkan suatu keadaan penduduk dengan jumlah dan kualitas yang seimbang dalam hal

perencanaan jumlah penduduk secara umum dan perencanaan keluarga secara khusus. Menurut mereka, dengan keluarga berencana jumlah dan kualitas penduduk dapat diukur dan direncanakan sehingga proses pembangunan suatu negara menjadi terarah. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa secara sederhana maupun mendalam informan memahami program KB secara memadai. Dalam arti, mereka mengikuti program KB tidak secara ikut-ikutan atau karena imbalan tertentu melainkan karena sedikitnya mereka sudah paham dan mengerti mengenai konsep program KB.

### **III.1.1.3 Perkembangan Program KB di Kecamatan Pakal**

Mengenai perkembangan program KB di Kecamatan Pakal, Peneliti mendapatkan keterangan dari beberapa pelaksana program KB yang ada di Kecamatan Pakal antara lain dari pihak BKKBN, Bapemas KB dan petugas lapangan KB. Informan menjabarkan perkembangan program KB mulai dari proses pengenalan program KB di kecamatan pakal hingga pada berkembangnya program KB khususnya KB pria di kecamatan pakal.

Proses pengenalan program KB kepada masyarakat di kecamatan pakal tidak melalui proses yang singkat. Sosialisasi program KB di kecamatan pakal telah dilaksanakan sejak awal diselenggarakannya program KB hingga saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Drs. Djunianto :

“ya, sejak kapan ya kalo nggak salah sejak 1998 ya mbak. Ya sejak program keluarga Berencana itu dicanangkan di kota Surabaya. Sebenarnya ya sudah lama ya mbak sudah sejak KB itu dicanangkan tapi kalo di kecamatan pakal

itu kan boomingnya ya setelah ada program KB pria dan pengikutnya banyak ya kalo nggak salah sekitar 2010-2011an lah.”

Menurut pernyataan Drs. Djunianto selaku kepala bidang KB Bapemas dan KB Surabaya, program KB sudah dilaksanakan di kecamatan pakal sejak tahun 1998, yaitu sejak program KB dijalankan di kota Surabaya. Namun mendekati tahun 2010 program KB di kecamatan pakal mengalami peningkatan jumlah partisipan yang signifikan, terutama untuk program kontrasepsi pria atau MOP. Hal ini mengantarkan kecamatan pakal menerima penghargaan dari pusat atas kategori partisipan terbanyak di Indonesia pada tahun 2012 dan juga menjadi kecamatan yang pertama di Surabaya yang membentuk paguyuban KB pria yang diberi nama “Paguyuban Siwalan Mesra”.

Mengenai hal ini Toni menyampaikan hal yang senada :

“ehmm mulai 2010 sampe 2011..kecamatan pakal itu juara dua nasional nasional untuk partisipasi MOP yang 2012 itu kemarin juara satu. “

Menurut Drs. Djunianto dan Toni selaku coordinator KB di kecamatan pakal, awal tahun 2010 merupakan puncak apresiasi MOP oleh Pria di kecamatan pakal. Program kontrasepsi pria yang diselenggarakan di kecamatan pakal mulai mendapat perhatian dari pria di wilayah kecamatan pakal dan menarik partisipan yang cukup banyak. Akseptor kontrasepsi pria yang pertama kali mengikuti MOP adalah Suharto warga kelurahan Tambak Dono Kecamatan pakal. Partisipasi Suharto menjadi akseptor MOP menjadi awal bagi keikutsertaan pria lain dan memberi kontribusi

dalam program KB di Kecamatan Pakal, seperti yang diungkapkan oleh Agus selaku camat pakal :

“itu sejak tahun 2009-2010. Ya awalnya dikit, tapi yang pengagasnya itu pak harto tau ya mbak itu aktif sekali jadi ya makin lama makin banyak. Disini kan pola masyarakatnya itu kan masih tradisional ya, ikatannya masih kuat, kekeluargaan itu masih ada, kekerabatan sistemnya. Jadi itu bisa dijadikan salah satu modal. Apalagi ini pak harto, pak harto ini kan RW juga, jadi ya partisipasinya sambil makan di warung itu kan non formal ya, jadi itulah pake pendekatan nonformal gitu mbak.”

Menurut agus selaku camat pakal, sejak saat itu Program KB di kecamatan pakal mendapat tanggapan dan partisipasi yang sangat bagus dari masyarakat secara presentatif dalam pelayanan kontrasepsi terutama untuk program kontrasepsi pria MOP. Menurut agus hal ini tak lepas dari kontribusi Suharto yang dengan sikap persuatifnya mengajak pria lain untuk menjadi akseptor MOP.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dr. sufyan :

“ya, jadi secara umum pakal sangat maju terutama untuk KB prianya, dan disini memang menjadi percontohan bagi kecamatan lain di Surabaya. karena pakal itu sendiri luar biasa, jadi pesertanya banyak, dan itu cukup mendukung sekali untuk pencapaian target KB pria.”

Pendapat Dr. Sufyan diperkuat oleh Muji :

“untuk sekarang, kalo dulu memang tidak ada sama sekali. Selama saya pegang disini, mulai tahun 2007 itu hanya orang satu saja, dari satu kecamatan Cuma satu saja. terus setelah kita mengadakan itu ya mbak, istilah grebeg pasar, grebeg terminal ya, itu kayaknya kita memberikan penyuluhan, memberikan konseling memberikan pemahaman akhirnya ada yang ikut mulai dari supir, tukang becak, penjual bakso, akhirnya juga tertarik dari satu orang ikut dua orang, akhirnya untuk kegiatan yang ada di terminal saja sampe bisa mencapai hampir 53 orang. “

Berdasarkan penjelasannya, Dr. Sufyan dan Muji mengiyakan adanya perkembangan yang signifikan di kecamatan pakal dalam hal penyelenggaraan kontrasepsi pria MOP. Dr. Sufyan menyatakan bahwa di kecamatan pakal antusiasme pria untuk mengikuti MOP sangat tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Surabaya sehingga memudahkan untuk pencapaian target KB pria. Sedangkan Muji menjelaskan bahwasannya sebelum diadakannya program-program untuk meningkatkan jumlah akseptor MOP seperti grebeg, jumlah partisipan pria untuk MOP sangat sedikit. Namun setelah adanya kegiatan grebeg seperti grebeg pasar dan Grebeg terminal jumlah partisipan untuk akseptor MOP menjadi lebih banyak.

Bahkan menurut beberapa informan keberhasilan penyelenggaraan kontrasepsi pria di kecamatan pakal dalam penyelenggaraan MOP dijadikan percontohan bagi kecamatan lain yang ada di Surabaya, seperti yang diungkapkan oleh Toni :

“saya rasa perkembangannya secara umum sama ya Cuma sana itu spesialis untuk MOP aja lebih menonjol bahkan sekarang itu namanya paguyuban itu sekarang sudah diundang di kecamatan-kecamatan yang lain untuk melakukan sosialisasi bagaimana MOP itu. Bahkan nanti ini tanggal 22 itu lima hari diundang kesini. Dan bapemas akan mengundang seluruh jajaran peserta MOP beserta calon peserta MOP dianjurkan kesini pak harto akan memberikan sosialisasi. “

Berdasarkan penjelasan Toni, sejak tahun 2010 program KB di kecamatan pakal mengalami perkembangan yang cukup besar terutama untuk program kontrasepsi pria atau MOP. Sejak saat itu pula kecamatan pakal membentuk

paguyuban KB pria “Siwalan Mesra” dan secara rutin dan intens melakukan sosialisasi untuk program KB terutama kontrasepsi MOP.

Oleh karena banyaknya minat pria untuk mengikuti MOP, maka jenis program inilah yang sedang dijalankan di kecamatan pakal saat ini. Kontrasepsi ini sedang dikembangkan di kecamatan pakal karena sampai saat ini, peminat MOP masih yang terbanyak diantara yang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Sufyan :

“ya, jadi yang sekarang sedang dikembangkan betul-betul adalah MOP atau vasektomi karena praktis, mudah dan relatif aman ya, dan itu diminati masyarakat.”

Menurut Dr. sufyan, MOP merupakan program KB yang sedang diminati oleh warga pakal karena sifatnya praktis, aman dan diminati oleh masyarakat. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Toni :

“sana itu spesialis untuk MOP aja lebih menonjol bahkan sekarang itu namanya paguyuban itu sekarang sudah diundang di kecamatan-kecamatan yang lain untuk melakukan sosialisasi bagaimana MOP itu. Bahkan nanti ini tanggal 22 itu lima hari diundang kesini. Dan bapemas akan mengundang seluruh jajaran peserta MOP beserta calon peserta MOP dianjurkan kesini pak harto akan memberikan sosialisasi.”

Berdasarkan beberapa penjelasan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa program KB dikecamatan pakal telah diperkenalkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan sejak awal dilaksanakannya program KB di Surabaya yaitu pada tahun 1998. Namun pada tahun 2010 kecamatan pakal mulai mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal pelaksanaan program kontrasepsi khususnya MOP. Antusiasme pria dalam program MOP di kecamatan pakal ini

dibuktikan dengan adanya pernyataan informan dan data yang menunjukkan peningkatan partisipasi pria dalam kontrasepsi MOP di kecamatan pakal dari tahun ke tahun seperti tabel di bawah :

**Tabel 3.1 Capaian Peserta MOP Kecamatan Pakal**

Tahun	Capaian Peserta MOP kecamatan Pakal
2010	17
2011	25
2012	126
2013	85

Sumber : Kecamatan pakal 2013, diolah.

Oleh karena partisipasi pria yang tinggi di kecamatan pakal, maka jenis kontrasepsi ini yang sedang dikembangkan di kecamatan pakal. Antusiasme pria yang tinggi dengan keseriusan pelaksana mengembangkan MOP di kecamatan pakal memunculkan inisiatif terbentuknya paguyuban KB pria “Siwalan Mesra”.

#### **III.1.1.4 Pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Program KB di Kecamatan Pakal**

Pada pelaksanaanya, program pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak terdapat kerjasama antara pelaksana program dengan masyarakat. Maka dari itu keberhasilan pelaksanaan program KB di kecamatan pakal juga tak lepas dari keterkaitan berbagai pihak seperti yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara dengan informan penelitian. Dr. Sufyan menjelaskan sebagai berikut :

“oh ya. Jadi kita, saya di perwakilan BKKBN provinsi ini punya teman teman di Bapemas dan KB jadi badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga

berencana di tingkat kota ya, Surabaya. Nah itu membawahi salah satunya kecamatan pakal dimana di pakal itu sendiri ada petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB termasuk juga kelompok KB pria itu sendiri yang punya susunan organisasi juga dari muspika, kecamatan sangat mendukung sekali.”

Dr. Sufyan dari BKKBN menjelaskan, dalam pelaksanaan program KB tentu ada berbagai pihak yang dilibatkan salah satunya adalah BKKBN. BKKBN yang merupakan lembaga utama yang memiliki fungsi utama pengaturan kependudukan dan keluarga berencana membawahi lembaga yang memiliki fungsi yang sama dengan BKKBN di tingkat kota yaitu Bapemas KB Surabaya. Selanjutnya, Bapemas KB Surabaya juga memiliki petugas lapangan yang bertugas di setiap kecamatan untuk membawahi langsung dan mengelola program KB yang sedang berjalan di kecamatan. Dr. Sufyan juga menjelaskan bahwa selain BKKBN, Bapemas KB dan PLKB aparat kecamatan dan kelompok KB juga turut mendukung terlaksananya program KB di Kecamatan Pakal.

Senada dengan Dr. Sufyan, Drs. Djunianto menambahkan :

“Yang pertama ya pak camat selaku pemimpin lingkungan sipil. Kemudian kasi sospemnya yang langsung berurusan dengan KB nya itu ya, kemudian PLKB dan PKB. Petugas kami rutin, jadi kalo untuk mengcover semuanya wes ndak nututi belum lagi kegiatan-kegiatan lain diluar, jadi inilah fungsinya PLKB untuk menangani segala sesuatunya yang bersifat operasional dalam program KB, semua wes di handle mereka, kita terima jadi aja. Selain itu juga ada puskesmas sama bidan itu peran mereka juga besar dan penting terutama sama hal-hal yang bersifat pelayanan ya macam pelayanan kontrasepsi.”

Drs. Djunianto berpendapat bahwa pihak yang terlibat dalam program KB di kecamatan pakal adalah aparat kecamatan dan PLKB. Menurut Drs. Djunianto, PLKB

memiliki peran yang sangat penting dalam segala bentuk operasional pelaksanaan program KB di kecamatan pakal. Agus juga menjelaskan hal yang sama :

“KB itu ada kalo disini itu ada PLKB, itu mereka di bawahnya bapemas tapi ditempatkan di kecamatan pakal. Koordinatonya ada,PKB itu. trus dibawahnya ada namanya PLKB. Nah disitu mereka yang keliling menjaring itu tadi, menjaring sekaligus sosialisasi.”

Selanjutnya, Pria yang menjadi akseptor KB di kecamatan pakal juga turut membentuk paguyuban untuk lebih menyukseskan program KB di kecamatan pakal khususnya kontrasepsi pria MOP. Para kader pria yang tergabung dalam paguyuban KB Pria “Siwalan Mesra” juga ikut mensosialisasikan MOP bersama dengan para pelaksana program KB di kecamatan pakal. Seperti yang dijelaskan oleh Toni :

“yang ikut terlibat, bapemas, Koordinator PLKB, PLKB, kader IMP kader IMP itu istilahnya Institusi Masyarakat Perkotaan kepanjangan tangan antara pemerintah dan masyarakat dan beliaunya itu ditokohkan disitu. Kalo di kecamatan pakal itu salah satunya pak harto. BKKBN juga terlibat emang itu dasarnya dari BKKBN. “

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa yang terlibat dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan program KB di kecamatan pakal adalah BKKBN Jawa Timur dan Bapemas KB Surabaya dan aparat kecamatan sendiri selaku pelaksana program KB. Selain BKKBN dan Bapemas KB terdapat (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) PLKB yang merupakan kepanjangan tangan dari bapemas KB kota Surabaya yang menjalankan secara teknis program KB di kecamatan pakal. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan keluarga berencana di kecamatan pakal, PLKB dibantu oleh kader KB yang ada termasuk paguyuban KB pria “Siwalan Mesra” dalam melakukan kegiatan-kegiatan keluarga

berencana. Sehingga dapat disimpulkan yang terkait dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan program KB di kecamatan Pakal adalah PLKB dan Paguyuban KB “Siwalan Mesra” selaku kader KB.

### **III.1.2 Partisipasi Pria dalam Program KB di Kecamatan Pakal**

#### **III.1.2.1 Alasan Pria di Kecamatan Pakal Berpartisipasi dalam Program KB**

Partisipasi pria dalam program KB bisa berbagai macam. Partisipasi pria yang paling sederhana dalam keluarga berencana adalah dalam hal menyetujui istri dalam menggunakan kontrasepsi. Sedangkan partisipasi pria dalam tahap yang lebih lanjut dapat dimanifestasikan dalam keikutsertaan menggunakan kontrasepsi dan mengikuti kegiatan keluarga berencana yang lainnya. seperti yang diungkapkan oleh Drs. Djunianto :

“menurut saya partisipasi pria yang sederhana ketika menyetujui istrinya ikut kontrasepsi itu juga partisipasi pria. Tapi partisipasi pria yang sesungguhnya adalah ketika seseorang laki-laki itu terlibat dan menjadi peserta KB itu. Misalnya vasektomi itu, atau MOP atau kondom nah itu baru disebut partisipasi pria. Nah kalo dari tingkat kesertaan ber-KB memang betul mereka partisipasi prianya dalam hal ikut vasektomi tinggi.”

Sesuai dengan penjelasan Drs. Djunianto, keterlibatan pria dalam program KB yang paling awal dapat diwujudkan dengan mendukung dan menyetujui istri menggunakan kontrasepsi. sedangkan pada tahap yang lebih lanjut keikutsertaan pria dalam program KB dapat dibuktikan dengan turut menggunakan kontrasepsi seperti menggunakan kondom atau MOP. Drs. Djunianto juga menyebutkan bahwasannya

keikutsertaan pria dalam penggunaan kontrasepsi di kecamatan pakal secara representatif cukup tinggi.

Berkaitan dengan penjelasan Drs. Djunianto, kecamatan pakal memiliki catatan tersendiri dalam hal penyelenggaraan kontrasepsi pria pada tahun 2012. Kecamatan Pakal menjadi kecamatan pertama di Indonesia yang memiliki catatan angka terbanyak dalam hal partisipasi pria dalam mengikuti kegiatan MOP. Berkenaan dengan itu, peneliti mencoba mewawancarai lima pria akseptor KB yang juga kader KB di kecamatan pakal untuk mendapatkan keterangan mengenai keikutsertaan mereka dalam program KB.

Dari hasil wawancara dengan lima orang akseptor KB di kecamatan pakal, peneliti menemukan ada banyak hal yang melatarbelakangi informan dalam partisipasi mereka dalam menggunakan kontrasepsi. Salah satunya adalah alasan perencanaan ekonomi kedepan dan kesejahteraan, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Wardoyo :

“ya memang enaknya ikut KB, ya tujuannya kan meringankan beban gitu, supaya ndak punya anak banyak-banyak, memang kan tujuannya kesitu,seandainya nggak ikut KB, 5 tahun 10 tahun kedepan seandainya ya saya punya anak kecil belum tentu bisa ngurus ya mbak ya”

Ahmad Wardoyo mengungkapkan alasannya mengikuti program KB yaitu MOP agar dapat merencanakan jumlah anak

Abd. Wachid juga mengungkapkan :

“Gini, kalo buat orang yang sudah cukup ya, dalam arti merasa anaknya sudah cukup ndak mau ditambah lagi, atau sudah cukup umur yang ndak

memungkinkan buat punya anak kecil lagi itu saya rasa cukup memberi manfaat ya. “

Senada dengan Abd. Wachid, Karisun juga mengungkapkan hal yang sama :

“Gini lo.. kalo setau saya ehmm tujuan pemerintah untuk mengadakan program KB laki-laki itu tidak lain ya untuk kesejahteraan keluarga katakan setiap orang itu diberi maksimal anak tiga cukup atau anak dua cukup itu memang bagus program itu, lagi tahun-tahun yang sekarang ini kan apa kalo anak banyak. Sekarang ini lho terus terang aja, kalo punya anak tiga delapan tujuh kayak orang dulu ya biayanya banyak juga, anak banyak punya hape banyak, anak banyak punya sepeda motor banyak, itu sudah tuntutan jaman sekarang. Jadi kalo ada KB laki-laki seperti itu saya sangat berterimakasih dan mendukung sekali. Lebih-lebih untuk warga yang kiranya ekonominya agak lemah, katakanlah ekonomi menengah ke bawah. Jadi itulah kurang lebih saya punya pemikiran”

Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh kedua akseptor di atas yaitu Ahmad wardoyo, Abd Wachid dan Karisun, alasan mereka ikut serta dalam kegiatan MOP adalah untuk perencanaan masa depan dan kesejahteraan dalam keluarga. Menurut mereka, dengan jumlah keluarga yang terkendali oleh kontrasepsi, perencanaan kedepan menjadi lebih sederhana dan tertata, terutama dalam hal perencanaan ekonomi dan kesejahteraan secara luas.

Sedangkan kedua akseptor lainnya mengungkapkan adanya pengertian yang lebih mendalam tentang konsep gender dalam program KB yang selama ini sedikit timpang, seperti yang diungkapkan oleh Suharto :

“sebetulnya sih ya sejak saya ikut KB untuk pria itu ya mbak, 2010, kan gini awalnya istriku istri saya itu kalo melahirkan kan susah terus laki semua lahir ga ada yang perempuan sampe 5 anak itu ga ada yang perempuan anak saya laki semua nah terus saya kepikiran untuk cari KB pria lha itu ga ada loh mbak, saya nyari itu, terus saya tau ada KB pria di kecamatan itu dari tim BKKBN mereka nawarkan kan ada mobilnya gitu ya mbak dateng ke

kecamatan gitu akhirnya saya nyoba ikut dulu, cocok, ga ada masalah akhirnya saya coba getok tular istilahnya ya pertamanya agak sulit gitu mbak tapi lambat laun diterima”

Senada dengan Suharto, Harold juga mengungkapkan hal yang sama :

“ya itu tadi, pertama saya sebagai seorang pria juga bertanggung jawab lah, yang kedua itu jalan terbaik, yang saya pilih gitu ya”

Berdasarkan penjelasannya, kedua akseptor di atas memiliki pengertian yang lebih dalam dalam program KB. Mereka memahami konsep keluarga berencana memiliki basis gender, sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan laki-laki dan perempuan secara sejajar. Hal ini diwujudkan dalam rasa pengertian dan tanggung jawab sebagai pria terhadap istri/pasangan dan keluarga. Sehingga dengan begitu, mereka ikut menggunakan kontrasepsi sebagaimana yang dilakukan pasangan sebelumnya.

### **III.1.2.2 Keterlibatan Pria dalam Kegiatan KB**

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya, keterlibatan akseptor pria ternyata tidak hanya sebatas pelaksanaan kontrasepsi aja, akan tetapi lebih lanjut mereka akan turut mensosialisasikan pengalaman mereka dalam menggunakan kontrasepsi kepada pria yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Suharto :

“oh iya mbak sangat, kan saya juga ikut apa ya istilahnya memotivasi orang lain gitu loh mbak tak bilang enak lho gini-gini jadi biar mereka itu tertarik ikut KB”

Suharto mengungkapkan bahwa keikutsertaannya dalam program KB tidak hanya diwujudkan dalam menggunakan kontrasepsi saja, akan tetapi juga turut

memotivasi orang sekitarnya untuk menggunakan kontrasepsi. Ahmad Wardoyo juga mengungkapkan bahwa beliau juga turut mensosialisasikan KB pria :

“ya itu mencari akseptor atau ngasih saran sama teman-teman, yang mau ikut, masalahnya nggak segampang itu mbak, kadang-kadang yang nggak tau itu ya permisi ya wong orang laki kok mau dikebiri gitu saya kan jengkel denger omongan gitu”

Ahmad Wardoyo mengungkapkan bahwa bersama dengan Suharto, dia juga ikut mengupayakan tercapainya target MOP dengan cara mensosialisasikan kepada teman dan rekan di sekitarnya. Ahmad Wardoyo menjelaskan bahwa tidak hanya sekedar mensosialisasikan namun juga turut meluruskan dan membenarkan anggapan yang salah selama mengenai isu pengebirian pada MOP.

Selain Suharto dan Ahmad wardoyo, Harold juga turut ikut serta mensosialisasikan MOP :

“ya kalo penyuluhan secara yang pribadi-pribadi juga kadang-kadang kita dipanggil ke kantor, saya pernah juga diajak konsultasi dengan MUI, saya termasuk yang diminta pendapatnya, jadi kita jadi semacam sponsor gitu ya hehehe”

Toni juga menambahkan, bahkan sosialisasi MOP yang dilakukan akseptor pria tidak hanya sebatas di kecamatan pakal saja, namun juga di kecamatan lainnya :

“bahkan sekarang itu namanya paguyuban itu sekarang sudah diundang di kecamatan-kecamatan yang lain untuk melakukan sosialisasi bagaimana MOP itu. Bahkan nanti ini tanggal 22 itu lima hari diundang kesini. Dan bapemas akan mengundang seluruh jajaran peserta MOP beserta calon peserta MOP dianjurkan kesini pak harto akan memberikan sosialisasi.”

Berdasarkan penjelasan dari informan tersebut, peneliti mendapat gambaran bahwasannya akseptor KB pria di kecamatan pakal cukup aktif dalam program KB. Dalam arti mereka tidak pasif sebatas menjadi penerima atau akseptor program KB saja, namun juga turut aktif mensosialisasikan program KB kepada pria yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, akseptor KB pria di kecamatan pakal membentuk paguyuban KB pria “Siwalan Mesra” dan menjadi motivator bagi pria yang tidak hanya sebatas di kecamatan pakal saja, melainkan di kecamatan-kecamatan lain di Surabaya.

Di sisi lain, para informan dari pelaksana program KB dalam hal ini BKKBN, Bapemas KB Surabaya dan aparat Kecamatan Pakal mengiyakan adanya partisipasi yang bagus dari akseptor KB pria di Kecamatan pakal. Hal ini dikemukakan oleh Dr. sufyan dari BKKBN Jawa Timur:

“ya, saya melihat dukungan itu sangat kuat ya. Jadi dari unsur pemerintahan maupun masyarakat sendiri itu sangat welcome sekali dengan sosialisasi dan pelaksanaan program ini. Jadi kecamatan pakal punya sebuah ide sendiri untuk mensosialisasikan program KB pria diantaranya grebeg ke pasar, ke terminal kemudian juga ke tempat-tempat seperti majelis ta’lim, itu mereka mensosialisasikan program KB pria khususnya vasektomi. ”

Selain Dr.Sufyan dari BKKBN Jatim, Muji selaku PLKB juga mengutarakan hal yang sama :

“oh iya, jelas penuh dan aktif mbak. Saiki kader sembarang iki ngirim mbak, rono kader, berangkat oke gitu loh mbak. Berarti yo jelas jiwa sosialnya itu ya tinggi, kalo jiwa social ndak tinggi yo berarti nggerundel. Terus disamping itu kerjasamanya juga bagus.”

Dr.Sufyan dan Muji mengutarakan, bahwasannya Akseptor Pria memiliki respon dan tanggapan yang positif akan hadirnya program KB pria. Akseptor pria terlibat aktif dalam kegiatan keluarga berencana khususnya dalam sosialisasi MOP, dalam hal ini Akseptor pria memiliki ide dan bergerak secara mandiri untuk mensosialisasikan program MOP di berbagai tempat seperti pasar, terminal, majelis ta'lim dan tempat-tempat umum lainnya. Selain aktif, akseptor pria juga memiliki sikap kerjasama yang bagus antar sesama akseptor/kader dan juga terhadap pemerintah penyelenggara keluarga berencana. Drs. Djunianto juga menyatakan hal yang sama mengenai sikap proaktif yang ditunjukkan oleh akseptor pria di kecamatan pakal :

“ehmm... saya baru nemu orang pelosok tapi orang-orangnya punya kepedulian tinggi ya di pakal ini, siwalan mesra itu. Jadi orang-orang ini.. ndak tau apa pak harto yang lebih piawai mengolah itu ya ndak capek itu, setiap ada even apa mesti ikut. Semuanya dan itu sukarela, dia ndak mau dibayar dan tidak dibayar. Dan kalo misalkan ada semangat untuk merancang itu, sederhana konsepnya. Di KB itu kan ada program kalo orang bilang buy one get two, nah itu kalo misalkan selesai dia kan dapet pengganti seratus untuk mengganti bekerja cari akseptor itu kan seratus ribu, nah dia sendiri orang yang dapet seratus ribu. Kalo bisa menularkan kepada orang laki-laki dan mau ikut dia dapet lagi seratus jadi dia dapet dua ratus dari operasionalnya jadi macam multilevel marketinglah. Konsep itu dicanangkan oleh pak harto , dia juga biasa disuruh memotivasi di wilayah lain itu misalnya dia dikasih sama anggaran lima ratus untuk mengelola itu, itu luar biasa.”

Toni selaku PLKB juga mengakui adanya partisipasi dan dukungan penuh untuk MOP di kecamatan pakal :

“ya tadi, disana kan ada paguyubannya jadi dia mendukung bahkan sekarang sudah ke kecamatan-kecamatan lain memotivasi ayo ikut KB dan disana itu

masyarakatnya saling mendukung sekali, saling membantu, saling mendukung sekali dia karena yang dilakukan disana kan pendekatan wilayah.”

Menurut penjelasan narasumber di atas, Akseptor pria di kecamatan pakal berkegiatan tidak hanya sebatas menjadi akseptor MOP saja, melainkan cukup aktif dalam berkegiatan terutama dalam sosialisasi MOP. Akseptor KB pria di kecamatan pakal tergabung dalam paguyuban KB “Siwalan Mesra” yang juga berkegiatan untuk lebih menyukseskan penyelenggaraan MOP di kecamatan pakal. Kegiatan yang mereka lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi MOP kepada pria lainnya yang mereka lakukan di berbagai tempat umum seperti pasar, terminal, warung, majelis ta’lim dan tempat umum lainnya. Berikut adalah susunan paguyuban KB Pria “Siwalan Mesra” :

Berikut adalah struktur kepengurusan paguyuban KB pria “Siwalan Mesra” :

Pelindung/Penanggung Jawab	: Camat Pakal
Ketua Organisasi	: Suharto Ahmad
Sekretaris	: Yuni
Bendahara	: Dewi Maharyani
Sie. Konseling	: Karisun
Sie. Humas	: Ahmad Wardoyo
Sie. Pemberdayaan	: Harold Martin

Sie. Agama : Abd. Wachid

Unit Terminal : Ahmad Wardoyo

Yatimun

Ismail

Didik

Rohmadi

Dali

Unit Warung : Karisun

M. Yahya

Maksum

Misbah Harianto

Kasianto

Burhan

Unit Pasar : Nurlan Efendi

Suradi

Edy Soetrisno

Abd. Wachid

Sapari

Joko Utomo

Unit Sentra PKL : Akhmad Khoirul

Iswanu

Tomo

Dwi Yulianto

Asmari

Hadi Prayitno

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya, sosialisasi MOP di kecamatan pakal yang dilakukan oleh paguyuban KB pria “Siwalan Mesra” dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu secara personal/informal dan secara bersama-sama/formal. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Sufyan :

“kalo penyuluhan hampir setiap hari di pakal saya kira. Hanya saja besarannya macem-macem, jadi ndak tentu kadang bareng-bareng turun, jumlah besar gitu ke pasar, kadang personal saja dari kelompok anggota tadi *getok tular* gitu. “

Selain Dr. Sufyan, Muji juga menyampaikan hal yang sama :

“ya yang agenda resmi itu biasane grebeg mbak, agenda tahunan, di pasar, terminal kayak tahun kemaren itu, target itu mbak, itu ndak rutin, setahun dua

kali, tiga kali gitu, yang sering itu ya kita jalan dewe mbak, ke RT-RT gitu, kadang ya ke terminal gitu, kadang juga yang kayak pak karisun jualan di pasar ya promosinya ke pasar ndak anu kok mbak ndak mesti, pokok e tetep kita jalan”

Menurut Dr. Sufyan dari BKKBN dan Muji selaku PLKB, ada dua kategori dari sosialisasi MOP yang dilakukan akseptor KB pria di kecamatan pakal untuk mensosialisasikan MOP. Yang pertama adalah sosialisasi secara personal/informal yang dilakukan secara *getok tular* oleh akseptor pria sendiri. Sedangkan kategori yang kedua adalah sosialisasi yang mereka lakukan secara bersama dan terjadwal dengan PLKB dan aparat kecamatan.

Mengenai sosialisasi personal, Suharto menjelaskan :

“sosialisasi itu termasuk program KB juga, ya saya juga ikut mbak, sosialisasi gitu kalo ketemu orang di terminal, cangkruk-cangkruk di warung, ngomong-ngomong gitu kurang lebih satu orang satu per hari gitu mbak”

Ahmad Wardoyo juga menjelaskan hal yang senada dengan Suharto :

“ya kadang, kalo diundang gitu ya ikut, tapi kalo saya lagi narik (angkutan umum) kerja gitu ya ga bisa mbak, tapi kalo suruh motivasi orang terminal ya sering mbak, waktu itu malah saya dapet berapa itu supir-supir yang mau ikut itu mbak, saya lupa tapi ya saya seringnya di terminal itu mbak. Kadang juga kalo di warung, ato kalo ada teman Tanya ya saya kasih tau, saya jelaskan gini-gini, ndak sakit enak apa segala mbak”

Sedangkan sosialisasi bersama dapat mereka lakukan secara bersama turun ke berbagai tempat umum, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Wardoyo :

“heem sambil getok tular gitu bawak brosur terus di kampung-kampung terus tukang becak dikasih tau vasektominya kalo ibu-ibu MOW nya kadang juga kasih tau ke orang laki-lakinya pengalaman sama suami yang vasektomi gitu

hahaha yang kayak gitu itu sering saya lakukan ga harus satu bulan sekali tapi rutinnya satu bulan sekali”

Karisun juga mengungkapkan hal yang sama :

“ya mungkin sebulan gitu mbak, sebulan sekali ya pokoknya saya tunggu bu yuni itu kalo ada kegiatan biasanya saya dibilangi berapa hari sebelumnya gitu pak karisun ayo jalan-jalan, kemana? ke RT sana RT sana barangkali nanti ada nanti nemu. Tapi baru-baru ini rupanya kok ada yang menyusul dua orang tiga orang langsung diajak ke BKKBN karena kan kalo manggil bis minimal 15 orang kan”

Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber di atas, Sosialisasi secara personal atau informal adalah sosialisasi yang paling mudah dan paling sering untuk dilakukan karena tidak terikat waktu, tempat dan kondisi. Sosialisasi ini dilakukan mereka sendiri saat bertemu dengan pria di tempat-tempat umum seperti warung, pasar dan terminal dengan tujuan mengumpulkan calon peserta MOP. Sosialisasi ini mereka lakukan dengan *getok tular* atau dalam arti lain memberitahu kepada pria calon akseptor tentang manfaat dan pengalaman mereka setelah menggunakan kontrasepsi. Sedangkan sosialisasi secara bersama mereka lakukan bersama dengan pelaksana program KB seperti dengan PLKB dan Aparat Kecamatan dalam agenda yang terjadwal yang rutin dilakukan sebulan sekali.

Selain sosialisasi dengan cara seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kelompok akseptor KB pria juga melakukan sosialisasi dan komunikasi melalui dunia maya, seperti yang diungkapkan oleh Agus :

“Kita nggak melihat warga, kebanyakan supir kan orang luar gitu tapi tetep kita ambil, kita bikin brosur. Apalagi kita juga bikin website, ada websitenya lho itu paguyuban KB itu. Saya dengarkan disitu itu juga banyak yang Tanya,

malah bukan orang Surabaya. nah nanti disana akan dijawab langsung oleh pak harto terkait permasalahan-permasalahan. Kadang, sebelum dia ikut KB kadang dia cari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan vasektomi ya. Nah disinilah peran kader ini tadi. Apapun pertanyaannya akan dijawab. Tentang apa yang membuat dia ragu. Nah itu juga sarana untuk komunikasi dan sosialisasi karena kan pake media itu tadi.”

Menurut agus, sosialisasi juga dilakukan melalui media social website milik Paguyuban “Siwalan Mesra”. Dalam website itu, calon akseptor dapat berinteraksi secara langsung terkait informasi mengenai MOP dengan akseptor pria anggota paguyuban KB pria “Siwalan Mesra”. Dengan begitu, media sosialisasi juga dilakukan melalui media social internet atau website.

### **III.1.2.3 Hambatan dan Kendala Pria dalam Berpartisipasi**

Di lain sisi, kendala dalam berpartisipasi dalam suatu kegiatan sangat dimungkinkan. Dalam program KB, berbagai kendala diungkapkan oleh beberapa informan, diantaranya adalah mengenai ketakutan pria sendiri untuk menggunakan kontrasepsi, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Sufyan :

“ya, jadi yang pertama adalah ketakutan ya, jadi karena informasi yang kurang mungkin, ditambah lagi dia menerima informasi dari sumber-sumber yang salah. Akibatnya itu semakin memundurkan kemauan mereka untuk ikut. Kemudian dari factor diluar pria itu sendiri maksudnya dari istrinya itu ada beberapa yang menganggap bahwa tidak usahlah suami ikut KB biar istrinya saja.”

Dr. Sufyan menyatakan bahwa kendala pria secara umum dalam mengikuti program KB adalah yang pertama adalah factor dari dalam pria itu sendiri yaitu ketakutan. Hal ini dimungkinkan karena adanya informasi dan pemahaman yang kurang atau salah mengenai kontrasepsi terhadap kaum pria. Adanya pemahaman

yang salah seperti ini dapat mengakibatkan mundurnya kemauan pria untuk ber-KB. Karisun juga mengungkapkan pengalamannya mengenai rasa takut untuk menggunakan kontrasepsi :

“kendala? Ya tergantung... KB itu biasanya kendalanya orang-orang itu satu dari waktu yang kedua itu belum anu itu, kadang kadang itu belum jelas. Kata orang jawa itu ikut KB ta? Loyo gitu. Banyak orang bicara gitu terus makanya saya ikut serta itu saya memberanikan diri pada waktu itu saya juga dapet informasi ternyata orang-orang yang ikut KB setelah dua tahun tiga tahun ya masih laki-laki. Ternyata sekarang saya juga ga ada katakanlah ga ada keluhanlah, ga ada biasanya gini kok maleh gini nggak ada. Jadi orang-orang yang belum ikut atau belum kenal vasektomi ini ya itu pikirannya itu nanti gini nggak anu nggak lanang masih tertutup gitu pikirannya mbak.”

Senada dengan karisun, Harold juga mengungkapkan hal yang sama :

“oh jelas itu mbak ya, yah namanya juga orang takut ya tapi kita luruskan nggak gitu tapi gini gini ya itu tugas kita sebenarnya untuk meluruskan ngasih tau mereka kalo MOP itu nggak sakit dan nggak ada efeknya”

Karisun mengungkapkan bahwa sebelum menjadi akseptor MOP sempat mengalami kendala ketakutan akan efek samping dari kontrasepsi pria. Hal tersebut juga menjadi kendala Karisun dan Harold dalam mensosialisasikan MOP. Sebagai akseptor sekaligus kader KB yang juga turut mensosialisasikan MOP, Karisun dan Harold turut membenarkan adanya kesulitan meluruskan anggapan yang salah tentang MOP pada calon akseptor KB di Kecamatan Pakal. Dalam hal yang sama, Muji juga menjelaskan :

“kendala? Anu mbak kadang kan orang sini gini... orang itu ndak sama yo ada yang masih takut ada yang mau mendengarkan kalo ada penyuluhan. Kadang gini ada orang yang dasarnya takut kadang meden-medeni orang seng ape melu padahal dia belum pernah merasakan sendiri. Makanya saya kalo memberikan penyuluhan jangan Tanya orang yang belum pernah ikut KB,

Tanya yang udah pernah.kalo mau Tanya MOW Tanya orang yang sudah ikut MOW. Nanti yang jawab itu sudah tau loro opo ora. Saya gitu, saya ngomongnya memang kasar gini mbak campur jawa. Soale orang sini campuran, ngomonge yo ngunu kui. Yang IUD ya saya suru Tanya yang sudah ikut IUD begitu juga MOP. Jangan Tanya yang belum pernah nanti yang ada di weden-wedeni maleh gak jadi lak ngono mbak.”

Menurut penjelasan Muji, rasa takut pria sebelum ber-KB dapat diatasi dengan menghadirkan akseptor yang sudah berpengalaman untuk memotivasi calon akseptor. Menurut Muji, penyuluhan dengan menghadirkan sosok yang telah berpengalaman penting untuk dilakukan untuk meluruskan anggapan yang salah.

Disamping factor internal, factor eksternal dari luar pria itu sendiri juga turut menentukan keikutsertaan pria dalam ber-KB. Hal yang dimaksud yaitu keengganan istri untuk mengizinkan suami menggunakan kontrasepsi, hal ini diungkapkan oleh Abd. Wachid yang pernah mendapat larangan untuk ber-KB dari istrinya:

“naaahh itu saya dulu itu gini, awalnya itu saya ga tertarik mbak wong istri saya itu juga ndak ada masalah sama KB, wes ndak anu apa namae ndak seberapa mbatin gitu. awale kan dia bilang gini wes gak usah mas aku wae seng melu, tapi lama-lama dia yo setuju wae saya vasektomi.”

mengenai hal ini Drs. Djunianto juga mengungkapkan penjelasannya :

“satu, keengganan ibunya pasangannya untuk mengizinkan suaminya untuk ikut KB. Alasannya klasik, nanti dipakai untuk selingkuh, untuk macem-macem, njajan, kan bebas padahal kan tidak seperti itu sebetulnya. Kalau mau selingkuh sebetulnya dalam segala aspek ada, bisa, tidak hanya di aspek keluarga berencana. Bahkan ada penelitiannya sendiri di BKKBN kecenderungan perempuan menolak pasangannya, ada itu MOP. Lebih baik saya, perempuan itu yang ikut. Kedua memang ada ketakutan bahwa MOP itu identik dengan kebiri, sudah mesti dimana-mana gitu. Padahal kebiri itu dihabisi, tidak diberi sisa, kalo itu ndak. Sebenarnya praktis, MOP itu praktis. Cuma mungkin ada kata operasi jadi orang itu takut. Kalo masalah ini,

tergantung penyuluhan pertama kali ikut apa ndak, itu kuncinya. Kalo bilang tau MOP pak, MOP itu tindakan bedah ini ini ini ya sampe seribu tahun gak akan dapet. Tapi kalo dengan bahasa yang halus, dengan kalimat yang tidak mengaburkan tapi tetep punya makna. Misalkan supaya ndak takut itu dibahasakan dengan istilah KB lanang, atau suntik lakek. Ada informasi, itu sebenarnya tidak mengikat Cuma diberi sembako sama uang seratus ribu sebagai biaya ganti kerja. Di beberapa daerah sudah mulai berani, kambing di gunung kidul, sleman sama bantul itu diberi kambing supaya apa, mestimulasi. Di gresik itu diberi sepeda, Surabaya paaling minim sembako dan uang seratus.”

Penjelasan Abd. Wachid dan Drs. Djunianto menguraikan bahwa selain ketakutan akan isu pegebirian, kendala pria dalam ber-KB juga dimungkinkan dengan keengganan istri untuk mengizinkan suami ber-KB. Alasan istri melarang suami menggunakan kontrasepsi adalah karena rasa khawatir akan efek samping masalah kesehatan dari tindakan operasi dan kurangnya rasa kepercayaan kepada suami sehingga istri melarang suami menggunakan kontrasepsi. Oleh karena itu menurut Drs. Djunianto pendekatan penyuluhan yang dilakukan harus lebih halus, personal dan mudah dipahami oleh pria. Pendekatan dan penyuluhan KB pria dapat dilakukan dengan menggunakan istilah yang halus dan dapat dipahami lebih baik oleh masyarakat seperti *KB lanang* atau *suntik lakek* dan juga memberikan *reward* atau semacam tanda terimakasih berupa sembako atau uang ganti kerja.

Dari penjelasan beberapa informan mengenai kendala pria dalam mengikuti program KB, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala pria dalam berpartisipasi dalam program KB berasal dari factor internal dan eksternal. Factor internal berasal dari dalam diri pria sendiri yaitu rasa takut untuk menggunakan kontrasepsi. Rasa takut pria ini menjadi kendala akseptor KB pria yang

mensosialisasikan MOP kepada calon akseptor MOP di kecamatan pakal. Selain factor internal ada juga factor eksternal yaitu yang berasal dari luar pria itu sendiri yaitu keengganan istrinya untuk mengizinkan suaminya menggunakan kontrasepsi.

Dari keseluruhan hasil wawancara dengan informan, menggambarkan adanya partisipasi yang baik dari akseptor KB pria di kecamatan pakal. Partisipasi yang paling awal ditunjukkan oleh informan adalah dengan mengikuti kegiatan pelayanan kontrasepsi yaitu menjadi akseptor MOP. Keseluruh pria yang telah menggunakan kontrasepsi yaitu akseptor MOP di kecamatan pakal tergabung dalam suatu wadah organisasi yaitu Paguyuban KB Pria “Siwalan Mesra” yang secara aktif ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan MOP di Kecamatan Pakal termasuk sosialisasi MOP.

### **III.1.3 Bentuk Partisipasi Pria dalam Program KB**

#### **III.1.3.1 Bentuk Interaksi Pria dengan Pihak Pelaksana KB dalam Forum KB**

Suatu program yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, tentu mengikutsertakan masyarakat pula dalam prosesnya. Prinsip ini ternyata diterapkan di kecamatan pakal. Pelaksana program KB memiliki interaksi yang intens dengan masyarakat di kecamatan pakal. Hal ini diungkapkan oleh Toni selaku coordinator PLKB :

“ iya, memang disitu kita membutuhkan mereka, kan PLKB disana cuman satu mbak, bu muji aja, saya coordinator, gak tiap hari disana, jadi yang membantu program itu ya mereka, paguyuban pria sama ibu motivator, ya

pokoknya kader-kader yang ada di pakal, misalnya bulan ini ada target berapa gitu MOP, lalu bu muji Tanya ayo bisanya hari apa, jam berapa itu sama kader-kader itu, itu peran mereka disitu ya meskipun gak selalu dateng semua tiap dipanggil tapi representative ya, selalu ada yang jadi wakil”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Agus :

“ lhaiya itu tadi saya bilang ada semacam kerjasama gitu kan mbak jadi saya kira ada kerjasama ya antara PLKB juga pos-pos itu. Saya rasa interaksi mereka cukup baik dan intensif ya dalam hal perencanaan kontrasepsi ya, paguyuban prianya aktif sangat loyal, PLKB nya juga menyeluruh ya bisa mengcover gitu ya handle segala macam bentuk kegiatan terutama MOP”

Menurut penjelasan Toni dan Agus, PLKB yang merupakan pelaksana teknis program KB di kecamatan pakal memiliki interaksi yang rutin dengan kader KB di kecamatan pakal. PLKB di kecamatan pakal merupakan kepanjangan tangan dari bapemas KB Surabaya yang melaksanakan program KB di kecamatan pakal secara teknis. Sedangkan kader KB dalam hal ini dapat dimaksud sebagai akseptor pria yang termasuk kelompok anggota “Siwalan Mesra”. Menurut kedua informan diatas, interaksi kedua pihak ini dapat dikatakan cukup baik. Pihak paguyuban pria sering membantu PLKB dalam sebuah pelaksanaan kegiatan dan PLKB cukup baik dalam melibatkan pihak akseptor pria dalam kegiatannya. Interaksi antara PLKB dengan Akseptor pria ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan MOP, seperti kegiatan perencanaan dan pelaksanaan MOP.

Interaksi yang diwujudkan oleh akseptor pria dan PLKB dilakukan secara rutin dan terjadwal seperti yang diungkapkan oleh Muji :

“ kita setiap bulan itu ada pertemuan paguyuban KB. Itu rutin memangnya satu bulan sekali, ya kita membicarakan program-program, apa yang harus kita.. kita melangkah harus kemana sekarang gitu lho.”

Ahmad Wardoyo juga mengungkapkan :

“setau saya sih ya mbak rutinnya itu tiap bulan itu ketemu sama PLKB itu ngomong-ngomong terus bikin rencana sosialisasi gitu mbak untuk MOP itu rutin mbak. Terus kalo udah terkumpul yang mau MOP baru rencana manggil bus dari BKKBN minimal 15 orang kan”

Selain ahmad wardoyo, Abd Wachid juga mengungkapkan :

“oh iya mbak itu biasanya rutin diadakan ketemu-ketemu gitu sama PLKB sama kader-kader yang lain buat diskusi gitu acara apa yang mau di buat itu biasanya ya sebulan sekali ato lebih lah ya sesuai bisanya kader sama PLKB nya tapi itu rutin mbak”

Menurut Muji, Ahmad Wardoyo dan Abd.Wachid pertemuan atau forum antara Pelaksana program dalam hal ini PLKB dengan akseptor pria dilakukan secara rutin dan terjadwal. Menurut informan, pertemuan tersebut dilakukan setiap bulan dalam rangka perencanaan pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan MOP. dalam agenda rutin bulanan itu, PLKB dan akseptor pria berdiskusi mengenai perencanaan agenda yang akan dilaksanakan.

Interaksi yang rutin antara PLKB dengan akseptor pria setiap bulannya memunculkan suatu bentuk/pola interaksi diantara mereka. Hal ini diungkapkan oleh beberapa informan seperti yang diungkapkan oleh Agus selaku Camat Pakal :

“ Nah disitu mereka ada interaksi antara kader-kader KB. Interaksi bisa dua arah jadi PLKB itu kan merupakan perpanjangan tangan dari bapemas, jadi programnya bapemas ini ini dan sebagainya lalu disampaikan ke kader KB, sama kader KB ditangkep dan dilaksanakan. Nah nanti kader KB juga

menyampaikan ke PLKB kayak permasalahannya itu ini, ini saling anu, dua arah. Biasanya minggu keberapa gitu lo, sudah ada jadwalnya kok”

Menurut Agus, antara PLKB dengan Akseptor pria memiliki interaksi yang intens dan bagus. Interaksi yang muncul dari keduanya bersifat dua arah dan saling memberi dan menerima. PLKB menjabarkan program dari bapemas, kemudian oleh kader KB dilaksanakan bersama-sama dengan PLKB. Lalu dari pelaksanaan itu kader KB juga menyampaikan permasalahan dan kendala yang mereka hadapi yang bersamaan dengan itu dilakukan evaluasi bersama.

Dr. Sufyan juga mengungkapkan hal yang sama :

“ya, kita lebih banyak sharing ya sama mereka gitu di setiap pertemuan jadi mereka sampaikan apa yang jadi masalah bagi mereka dan yang lainnya lalu kita coba cari jalan keluarnya kita coba akomodir yah gitu aja saya rasa mereka sudah mandiri dalam hal pengambilan tindakan ya. Contohnya saja kemaren yang bikin grebeg pasar terminal dan sebagainya itu saya rasa mereka sendiri. Itu yang bareng-bareng ya yang terlihat, belum lagi mereka konseling dengan satu persatu orang kalau ketemu di warung dan sebagainya. Bagus sekali kader-kader di kecamatan pakal. Jiwa social mereka dan kesadaran socialnya tinggi.”

Dr. Sufyan juga mengungkapkan adanya interaksi dan sharing bersama mengenai program KB dan permasalahannya dengan akseptor pria yang juga kader KB di Kecamatan Pakal. Dan dari permasalahan yang diungkapkan akseptor dan kader pria itu pihak pelaksana akan mengakomodir dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Selain agus, Drs. Djunianto juga mengungkapkan hal yang sama:

“Kalo bentuk interaksi, hmm bentuk interaksi ya seperti biasa mereka Tanya kita jawab, mereka meminta kita mencoba menyanggupi ya semacam ada

ikatan apa ya gitu lah apa namanya itu intinya ya kita saling berpendapat, ada masalah kita coba pecahkan bersama”

Menurut ketiga informan diatas, secara teknis pelaksanaan program KB di kecamatan pakal dilakukan oleh PLKB (dibawah pengawasan Bapemas KB Surabaya) bersama dengan kader KB dalam konteks ini paguyuban KB pria “Siwalan Mesra”. Penyampaian program dimulai dari Bapemas KB kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui PLKB untuk dilaksanakan. Hal ini secara otomatis memunculkan suatu hubungan yang interaktif antara PLKB selaku pelaksana teknis program KB di Kecamatan Pakal dengan masyarakat dalam hal ini kader KB yaitu akseptor pria “Siwalan Mesra”. Sehingga terdapat hubungan yang simultan dan dua arah antara PLKB dengan akseptor pria.

Dalam konteks yang sama Suharto menambahkan :

“ kalo masalah hal itu iya mbak memang kita sering ngomong sama plkb atau bapemas tukar opini gitu masalah ini itu ada jalan jalan atau konseling dan untuk tindakannya memang lebih banyak paguyuban yang turun mbak, memang lebih banyak kita yang punya inisiatif buat terjun seperti itu mbak, sama plkb juga. Kalo bapemas jarang biasanya mereka monitoring lewat plkb. Jadi ya memang kita ya saya sama temen-temen paguyuban yang lain yang ngadain gitu, ayo rek jalan jalan sama plkb nya juga”

Suharto menambahkan, bahwa terdapat hubungan yang sangat dekat antara PLKB dengan akseptor pria di kecamatan pakal. Suharto mengaku sering dilibatkan dalam proses konseling dan motivasi untuk MOP. Abd. Wachid selaku kader KB juga menambahi :

“ya apa ya mbak, ya kalo pas ada acara gitu dipertemukan ya paling nanya, atau kita yang ditanyai pendapat gimana enaknyanya, dimana bisanya hari apa gitu tao kalo pas mereka yang nentuin jadwalnya ditanya bisa apa enggak, kalo gak bisa ya gak papa gitu tok se”

Abd Wachid mengungkapkan adanya komunikasi dua arah yang diwujudkan dalam proses Tanya jawab dalam setiap pertemuan dengan PLKB. Proses Tanya jawab biasanya membahas tentang jadwal atau detail acara/kegiatan yang akan diselenggarakan.

Harold juga mengungkapkan hal yang sama mengenai interaksi mereka :

“ya biasanya kita ngomong gitu ya mbak, saling memberitahu informasi sama PLKB sama bapemas misalnya kapan bisa diadakan pelayanan kontrasepsi, sudah dapat berapa akseptor yang mau di MOP, yah kira kira seperti itu lah nyatanya kita kalo ketemu saling berbicara kita sampaikan apa yang jadi masalah kita dan sebagainya nanti mereka coba penuhi, coba akomodir lah, ya bisa juga dibilang mereka yang kasih fasilitas.. ya bisa dibilang begitu suatu bentuk kemandirian kita ya mbak”

Berdasarkan penjelasan informan yang juga akseptor pria di atas, interaksi antara PLKB dengan Akseptor pria terjadi ketika ada forum perencanaan kegiatan. Di dalam forum ini terdapat proses komunikasi dan penyampaian pesan dua arah pada kedua belah pihak yaitu PLKB dan akseptor pria. Akseptor pria mengaku di dalam forum tersebut terdapat proses bertukar opini/pendapat dan bertukar informasi antara mereka dengan PLKB dalam hal perencanaan kegiatan seperti sosialisasi dan pelayanan MOP. Hubungan interaktif seperti ini diwujudkan dalam penentuan jadwal, waktu, tempat dan detail-detail sebuah kegiatan yang berkaitan dengan MOP. Menurut Akseptor, selain untuk merencanakan kegiatan, forum juga digunakan untuk

proses komunikasi antara PLKB dengan akseptor dalam proses penyelesaian masalah bersama.

Disamping adanya hubungan interaktif yang didasari kesukarelaan, terdapat hubungan yang didasari oleh insentif atau kompensasi untuk menyemangati pria dalam mengikuti pelayanan MOP dan juga sosialisasi seperti yang dijelaskan oleh Toni selaku koordinator PLKB :

“ MOP, kalo MOP yang mau ikut dapet seratus ribu, kalo yang lain enggak hanya MOP aja”

Dr Sufyan Juga menambahkan :

“ya, saya rasa ada ya dan itu saya yakin dari bapemas juga ada ya semacam kompensasi untuk menarik akseptor lalu ada juga uang transport ya bagi motivator”

Toni dan Dr sufyan menjelaskan bahwasannya terdapat anggaran untuk menarik minat pria dengan memberikan uang insentif atau honor bagi pria yang mau mengikuti kegiatan pelayanan MOP. Sependapat dengan akseptor pria juga menambahkan adanya hubungan yang didasari oleh suatu imbalan atau insentif dari pelaksana program KB dalam pelaksanaannya, hal ini diungkapkan oleh Ahmad Wardoyo:

“ya itu yang pertama kali ikut kan dapet uang seratus ribu, kalo bawa akseptor lagi dapet lagi seratus ribu gitu mbak”

Senada dengan Ahmad Wardoyo, karisun juga mengamini adanya insentif untuk pelaksanaan kontrasepsi :

“ohh itu, iya dapet pas awal aja mbak seratus ribu kalo bawa orang pas pelayanan gitu dapet lagi mbak itu, seratus apa seratus lima puluh gitu dapet mbak tapi yo kan kita tujuannya ndak gitu ya itu tadi seperti yang saya bilang selama tujuan saya baik untuk masyarakat saya disini minimal saya ndak ada kepentingan apa-apa ndak berharap apa-apa”

Ahmad Wardoyo dan Karisun mengiyakan adanya insentif berupa uang tunai untuk kompensasi atas keikutsertaan dalam kegiatan MOP. Selain kedua akseptor diatas, Harold juga mengatakan hal yang sama :

“yaa.. kadang sih ada ya semacam uang lelah gitu, sama kalo dapet calon akseptor dapet biasanya ada bonus gitu ya”

Suharto juga mengungkapkan adanya kompensasi dalam pelaksanaan MOP :

“ya pertemuannya biasanya sesama orang laki-laki gitu mbak di warung, terus terminal gitu ngomong-ngomong sambil nyari partisipan KB gitu hehe.... sosialisasi gitu kalo ketemu orang di terminal, cangkruk-cangkruk kurang lebih satu orang satu per hari gitu mbak / partisipan biasanya dari bapemas dapet seratus ribu satu orang. sambil getok tular gitu bawak brosur terus di kampung-kampung terus tukang becak dikasih tau vasektominya”

Abd Wachid juga menambahi :

“ooh itu, masalah itu iya memang benar ada uang itu mbak dari awal kita ikut MOP aja dapet seratus ribu, terus kalo kita bawa itu kita dapet lagi uang, kalo ada acara gitu juga royal kok mereka kasih uang transport, konsumsi juga iya memang ada kalo itu”

Kelima informan sekaligus akseptor diatas mengaku mendapat imbalan dalam mengikuti kegiatan kontrasepsi MOP. Informan mengatakan adanya kompensasi atau imbalan sebagai uang ganti mereka dalam mengikuti kontrasepsi MOP. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang didasari dan disertai imbalan tertentu dari pihak pelaksana dalam menarik partisipasi atau keikutsertaan masyarakat. Informan

mengaku mendapat kompensasi sebesar seratus ribu rupiah sebagai uang ganti dalam keikutsertaan menjadi akseptor MOP. Disamping mendapat uang ganti keikutsertaan MOP, akseptor juga mendapat uang ganti yang senilai bila akseptor tersebut bisa mendapatkan calon akseptor lain untuk mengikuti MOP. Konsep ini mirip dengan konsep *multilevel marketing* dan konsep ini dibuat dan diperkenalkan oleh bapemas dengan Paguyuban KB “Siwalan Mesra” untuk lebih menyemangati masyarakat dalam ikut serta dalam program KB seperti yang dijelaskan oleh Drs. Djunianto :

“Di KB itu kan ada program kalo orang bilang buy one get two, nah itu kalo misalkan selesai dia kan dapet pengganti seratus untuk mengganti bekerja cari akseptor itu kan seratus ribu, nah dia sendiri orang yang dapet seratus ribu. Kalo bisa menularkan kepada orang laki-laki dan mau ikut dia dapet lagi seratus jadi dia dapet dua ratus dari operasionalnya jadi macam multilevel marketinglah. Konsep itu dicanangkan oleh pak harto , dia juga biasa disuruh memotivasi di wilayah lain itu misalnya dia dikasih sama anggaran lima ratus untuk mengelola itu, itu luar biasa.”

Di samping dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan MOP, insentif juga diberikan kepada akseptor pria dalam kegiatan dan prestasinya dalam pencapaian target MOP, hal ini diungkapkan oleh Drs. Djunianto :

“ ya ada beberapa misalkan sederhana ya, ehmm.. reward kepada mereka.. rewardnya itu mereka butuh sekali. Rewardnya itu sebenarnya tidak harus berupa uang, tapi misalkan saya punya temu kader pria di jogja gitu ya kita kirimkan pesan ini lho reward. Terus mereka berhasil melakukan pencapaian itu sama pemerintah pusat direward gitu, juara satu, diberi hadiah. Secara keseluruhan reward-reward itu memang nggak rata ya, tapi yang menikmati kita berharap ya semua yang ada di situ. Saya juga nggak ikut campur ya sehingga dengan reward itu mereka mempunyai rasa memiliki, rasa cinta kepada kelompok dan sebagainya”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Suharto :

“ya soalnya kan dari BKKBN itu kita kan menang mbak dari propinsi ya dapat hadiahnya uang lima juta gitu mbak kalo uang sih biasanya dapat hadiah hadiah”

Berdasarkan keterangan Drs. Djunianto dan Suharto selain insentif untuk keikutsertaan MOP, juga terdapat hadiah atau *reward* bagi akseptor pria di kecamatan pakal atas prestasi dalam hal pencapaian target MOP. Menurut Drs. Djunianto *Reward* ini diberikan kepada kelompok paguyuban “Siwalan Mesra” atas prestasinya dalam ikut serta dan turut mensosialisasikan MOP di kecamatan pakal. *Reward* semacam ini menurut informan layak dan perlu diberikan kepada suatu kelompok dalam masyarakat agar menciptakan rasa tanggung jawab dan kecintaan terhadap kelompok.

### **III.1.3.2 Bentuk Kerjasama Pria dengan Pihak Pelaksana KB dalam Hal Penentuan Aksi dan Penyusunan Agenda Kegiatan KB**

Di sisi lain, bentuk partisipasi akseptor pria dalam program KB tidak hanya diwujudkan dalam pelaksanaan MOP saja, akan tetapi juga dalam penentuan dan penyusunan agenda kegiatan. Dalam penyusunan agenda kegiatan, informan mengaku terdapat kerjasama dalam penentuan agenda kegiatan seperti yang diungkapkan oleh Harold :

“kadang kalo kita ada pertemuan ya kita adakan bersama gitu, ya kita adakan bersama dengan pos-pos KB, PLKB ya terutama”

Selain Harold, Muji juga menjelaskan :

“ kita kumpulkan mbak. Kapan bapak-bapak bisa, nanti saya yang ngikuti soalnya kan anu misalnya mereka mintanya sabtu ya saya ngikuti sabtu masio aku libur. Jadi gini aku nanya kalian bisanya kapan nanti tak cateti sampe jam-jamnya, tak bilang sampe bengi kadang kan sampe jam sembilan mbak. Wes sak jam-jame de’e ngejak sore ayo, ngejak isuk ayo trus kita ngikuti gitu lho. Tapi harus kita tentukan bareng-bareng berangkat dari mana jam berapa hari apa saya yang ngikuti. Masio hari minggu nek aku dijak mlaku yo ayo. Kalo saya yang menentukan ndak bisa, intinya kerjasama mbak tetep kerjasama ngapain aja diomongkan bareng-bareng”

Berdasarkan keterangan akseptor pria yaitu Harold dan Muji selaku PLKB, mereka sering dikumpulkan dalam sebuah forum pertemuan yang diantara tujuan dari pertemuan itu adalah menentukan agenda kegiatan. Menurut muji setiap kegiatan yang berkaitan dengan MOP selalu melibatkan akseptor pria “Siwalan Mesra” dalam pengambilan keputusannya. Berdasarkan keterangannya, muji mengungkapkan bahwasannya PLKB yang lebih banyak mengikuti jadwal akseptor pria yang ikut bersosialisasi. Sebab menurut Muji, jadwal pertemuan dan perencanaan semacam ini tidak dapat ditentukan sepihak hanya dari PLKB saja, melainkan kesepakatan kedua pihak yaitu PLKB dengan akseptor/kader pria.

Dalam konteks yang sama, Suharto juga menjelaskan hal yang senada dengan Muji dan Harold :

“ kalo masalah hal itu iya mbak memang kita sering ngomong sama plkb atau bapemas tukar opini gitu masalah ini itu ada jalan jalan atau konseling dan untuk tindakannya memang lebih banyak paguyuban yang turun mbak, memang lebih banyak kita yang punya inisiatif buat terjun seperti itu mbak, sama plkb juga. Kalo bapemas jarang biasanya mereka monitoring lewat plkb. Jadi ya memang kita ya saya sama temen-temen paguyuban yang lain yang ngadain gitu, ayo rek jalan jalan sama plkb nya juga “

Suharto selaku ketua paguyuban akseptor pria di kecamatan pakal menjelaskan bahwa akseptor pria sering melakukan komunikasi dengan PLKB dalam hal penentuan aksi/kegiatan yang berkaitan dengan MOP. Namun menurut Suharto, yang lebih punya inisiatif dan lebih banyak turun secara teknis dalam kegiatan MOP adalah paguyuban pria.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, selain dari PLKB dan akseptor pria, peneliti juga mendapatkan keterangan mengenai adanya peran yang lebih besar oleh akseptor pria paguyuban “Siwalan Mesra” dalam berbagai bentuk kegiatan MOP dari pelaksana KB yaitu dari BKKBN dan Bapemas KB Surabaya, dalam konteks ini Dr. Sufyan berpendapat :

“ ya, disini saya melihat memang yang aktif pada petugas-petugas lapangan disana kader KB dan juga kelompok KB prianya itu bersinergi bersama bagus sekali kerjasamanya. Ini mereka menyebarkan informasi yang sangat massive gitu, masyarakat banyak yang tau akhirnya oh ternyata KB pria seperti ini. Ya jadi peran-peran mereka penting, tapi masyarakatnya sendiri mungkin apabila tidak dikasih informasi seperti itu mungkin ya nggak akan tau mereka”

Drs. Djunianto juga berpendapat :

“oh iya, kelompoknya pak harto itu penting ya disana, saya liat disana juga meskipun sedang tidak ada PLKB mereka juga ndak pusing kumpul bareng bapak-bapak yang lainnya yang punya kesempatan untuk berkumpul untuk merencanakan sebuah aksi turun ke pasar misalnya, atau ke terminal itu mereka yang bikin acara ya saya rasa itu sudah bentuk kemandirian mereka”

Menurut Dr. Sufyan dan Drs. Djunianto kelompok KB pria memiliki andil dan peran yang cukup besar dalam pelaksanaan agenda kegiatan KB yang berkaitan dengan MOP. Para akseptor pria proaktif dalam menyebarkan dan memperkenalkan

kepada masyarakat tentang konsep MOP dan pengalaman mereka menggunakan kontrasepsi MOP. Menurut kedua informan tersebut tidak jarang para akseptor pria menentukan dan merencanakan sendiri agenda kegiatan untuk sosialisasi sampai pada pelaksanaan MOP. Selain kedua informan di atas peneliti juga mendapatkan keterangan dari beberapa kader dan akseptor pria diantaranya Suharto :

“ kalo pertemuan pertemuan itu dari paguyuban kita ngadakan ee yooop rek ngumpul ngumpul yo biasanya kita jadwalkan sendiri terus ketemu dimana gitu janji, ngopi di warung atau pas lagi ditelpon lagi banyak yang ngumpul di tempat mana gitu mbak”

Harold ikut menambahkan :

“ ehmm selama ini kita masih murni ya mbak ya, biasanya yang bikin jadwal agenda kegiatan itu paguyuban sendiri lalu kita baru undang bapemas gitu.”

Suharto dan Harold menunjukkan adanya keseragaman pernyataan mengenai adanya peran pria yang proaktif dalam kegiatan KB khususnya MOP. menurut mereka, Paguyuban pria sering secara intern dan terlebih dahulu merencanakan kegiatan lalu mengundang pihak pelaksana. Selain kedua informan di atas, Ahmad Wardoyo juga menjelaskan :

“ya itu biasanya dari pihak paguyuban aja mbak kalo setau saya, nanti yang lain cuman dipanggil aja, dari bapemas diundang sama paguyuban, nanti kalo misalnya ada kegiatan ya kita tentuin jadwalnya terus kita tanya sama PLKB, bapemas bisa apa enggak ikut nanti mereka datang, mereka yo sering datang kok mbak selalu kalo kita bilang gitu mau ngadain acara mereka pasti bisa apalagi PLKB itu wes total mbak bantu kita”

Karisun juga mengungkapkan hal senada :

“oh iya mbak malah untuk kegiatan kegiatan yang menyangkut program KB itu lebih banyak kita yang tentukan dari pihak paguyuban sendiri, kayak misalnya ngadain penyuluhan di terminal, pasar itu kita ngajak PLKB mereka kan siap selalu di sini di kecamatan sini itu dibelakang kantornya jadi kalo ada apa apa itu kita ya selalu ngomong sama bu muji kadang kalo ada pak toni juga”

Dari penjelasan beberapa akseptor di atas, menunjukkan adanya peran yang lebih besar dari akseptor dalam penyusunan agenda kegiatan. Hal ini ditunjukkan dari jawaban akseptor yang menyatakan bahwa mereka turut menjadwalkan sendiri mengenai detail kegiatan yang mereka buat. Berdasarkan keterangan akseptor, setelah menyusun dan menjadwalkan kegiatan KB maka pihak akseptor baru akan mengontak pihak pelaksana. Pihak pelaksana dalam hal ini mengiyakan adanya kemandirian akseptor dalam membuat dan menyusun agenda kegiatan seperti yang diungkapkan oleh Drs. Djunianto :

“Dan itu tadi kalo ditanyakan berkaitan dengan apakah setiap yang disampaikan selalu dipertimbangkan, kita berusaha untuk itu. Misal mereka butuh pusat informasi, kita sediakan sarananya, prasarananya seperti buku, brosur, pamphlet, setiap itu kita siapkan, mereka yang ngolah sendiri”

Muji selaku PLKB juga mengungkapkan hal yang sama :

“iya kita fasilitasi mbak, yang jelas kita memfasilitasi soale opo mbak kita juga dianggep pihak sana ya kita ngikutin aja soale supaya bisa berjalan gitu mbak. Kalo orang nurut kita terus kan juga ndak bisa”

Penjelasan Drs. Djunianto dan Muji dari pihak Bapemas KB Surabaya mengiyakan adanya kemandirian akseptor pria dalam menentukan agenda kegiatan. Kedua informan di atas mengungkapkan bahwa akseptor pria bersikap mandiri dalam menyusun dan melaksanakan agenda dalam program KB khususnya MOP. Dengan

demikian, pihak pelaksana hanya perlu mengakomodir dan memfasilitasi kebutuhan mereka terkait dengan pelaksanaan program KB.

### **III.1.3.3 Peran Pria dalam Program KB**

Disamping terlibat dalam urusan pelaksanaan MOP dan sosialisasinya, pria di kecamatan pakal yang telah menjadi akseptor MOP juga memiliki peran penting dalam kegiatan MOP di kecamatan pakal. Diantaranya adalah Suharto selaku ketua paguyuban “Siwalan Mesra” yang mengungkapkan :

“Di samping saya aktif jadi ketua paguyuban KB satu minggu sekali itu saya ketemu dengan lurah-lurah untuk KB Tanya proker proker masing masing terutama KB pria, selama ini yang jadi sasaran kan KB prianya kalo saya biasanya sama lurah lurah itu ngomong tentang KB atau ngundang orang buat motivasi buat ikut KB gitu biasane mbak”

Suharto mengungkapkan bahwasannya dirinya memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan MOP di Kecamatan Pakal khususnya perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Suharto pribadi memiliki kegiatan rutin untuk menyumbangkan pemikirannya dalam merumuskan program-program kerja dari paguyuban untuk kegiatan KB khususnya MOP bersama dengan lurah di kecamatan pakal setiap minggunya. Suharto menambahkan lagi :

“kalo masalah hal itu iya mbak memang kita sering ngomong sama plkb atau bapemas tukar opini gitu masalah ini itu ada jalan jalan atau konseling dan untuk tindakannya memang lebih banyak paguyuban yang turun mbak, memang lebih banyak kita yang punya inisiatif buat terjun seperti itu mbak, sama plkb juga. Kalo bapemas jarang biasanya mereka monitoring lewat plkb. Jadi ya memang kita ya saya sama temen-temen paguyuban yang lain yang ngadain gitu, ayo rek jalan jalan sama plkb nya juga “

Suharto menambahkan, bahwa dia bersama dengan paguyuban pria sering berkomunikasi dan bertukar opini seputar KB khususnya MOP bersama dengan PLKB dan pihak pelaksana KB. Menurut Suharto, untuk tindakan turun ke lapangan atau sosialisasi MOP Suharto mengungkapkan adanya peran yang lebih banyak dari paguyuban pria dan PLKB. Menurutnya paguyuban banyak melibatkan diri dalam perencanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan pelaksanaan MOP. Sehingga menurut Suharto, paguyuban memiliki peran yang lebih banyak daripada pihak pelaksana KB dalam kegiatan sosialisasi MOP di Kecamatan Pakal.

Beberapa akseptor pria yang juga kader KB pria di kecamatan pakal menunjukkan perannya dalam kegiatan MOP melalui wawancara berikut, seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Wardoyo :

“oh iya mbak itu biasanya rutin diadakan ketemu-ketemu gitu sama PLKB sama kader-kader yang lain buat diskusi gitu acara apa yang mau di buat itu biasanya ya sebulan sekali ato lebih lah ya sesuai bisanya kader sama PLKB nya tapi itu rutin mbak”

Senada dengan Ahmad Wardoyo, Karisun juga mengungkapkan hal yang sama :

“ ya termasuk saya ini ikut pengurusnya pak Suharto ini, ya pokoknya dimana, kapan saya diajak untuk motivasi pertemuan ato ada kegiatan ya kalo misalnya di terminal, pasar dan lain lain itu ya saya usahakan ikut. Belum lagi kalo saya lagi cangkruk istilahnya apa anak muda bilang sekarang nongkrong ya sama bapak-bapak yang lain ya saya usahakan untuk ngajak mereka saya motivasi bilang kalo saya ini buktinya ikut juga gak apa apa”

Ahmad Wardoyo dan Karisun mengungkapkan hal yang senada dengan yang diungkapkan oleh Suharto, yaitu bahwa mereka dan pria lain yang telah menjadi

akseptor MOP juga terlibat dalam kepengurusan Suharto. Peran paguyuban dalam kegiatan ini adalah menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk setiap pertemuan yang membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KB khususnya MOP. Kedua informan mengaku dalam forum mereka sering bertukar opini dan pengetahuan untuk menunjang pelaksanaan MOP di kecamatan pakal. Hal ini dilakukan dengan cara bekerjasama secara sinergis oleh paguyuban dan PLKB demi mencapai tujuan bersama yaitu tercapainya target pelaksanaan MOP. Harold sebagai akseptor dan kader juga mengungkapkan bahwa paguyuban dalam konteks ini berperan dalam menentukan agenda dan jadwal pertemuan antara paguyuban dengan PLKB :

“ehhmm selama ini kita masih murni ya mbak ya, biasanya yang bikin jadwal agenda kegiatan itu paguyuban sendiri lalu kita baru mengundang bapemas gitu”

Beberapa informan dari pihak pelaksana seperti BKKBN dan Bapemas Surabaya mengungkapkan adanya peran masyarakat lokal di kecamatan pakal yaitu akseptor pria yang juga sekaligus menjabat sebagai kader disana. Seperti yang diungkapkan oleh Agus selaku camat pakal :

“nah disini itu ada namanya forum PLK, Jadi instansi vertikal tadi apa itu PLKB tadi dia punya semacam kader, kader KB namanya. Setiap RW ada, nah ini yang bergerak. Lha itu setiap bulan itu kumpul disini. Ada penyuluhan-penyuluhan, nah ini yang jadi ujung tombaknya ini, kader KB ya termasuk paguyuban siwalan mesra, ibu-ibu pos KB itu mbak mereka aktif sekali”

Agus mengungkapkan bahwa di PLKB dan kader pria di kecamatan pakal rutin melakukan forum untuk perencanaan kegiatan MOP. Menurut agus, setiap bulan

PLKB dan kader rutin menyelenggarakan pertemuan dan kader sangat berperan sebagai partner untuk mengambil keputusan bagi PLKB. Drs. Djunianto mengungkapkan :

“kelompoknya pak harto itu penting ya disana, saya liat disana juga meskipun sedang tidak ada PLKB mereka juga ndak pusing kumpul bareng bapak-bapak yang lainnya yang punya kesempatan untuk berkumpul untuk merencanakan sebuah aksi turun ke pasar misalnya, atau ke terminal itu mereka yang bikin acara ya saya rasa itu sudah bentuk kemandirian mereka”

Senada dengan Drs. Djunianto, Dr. sufyan juga mengungkapkan hal yang sama :

“ya, kita lebih banyak sharing ya sama mereka gitu di setiap pertemuan jadi mereka sampaikan apa yang jadi masalah bagi mereka dan yang lainnya lalu kita coba cari jalan keluarnya kita coba akomodir yah gitu aja saya rasa mereka sudah mandiri dalam hal pengambilan tindakan ya. Contohnya aja kemaren yang bikin grebeg pasar terminal dan sebagainya itu saya rasa mereka sendiri. Itu yang bareng-bareng ya yang terlihat, belum lagi mereka konseling dengan satu persatu orang kalau ketemu di warung dan sebagainya. Bagus sekali kader-kader di kecamatan pakal. Jiwa social mereka dan kesadaran socialnya tinggi”

Drs. Djunianto dan Dr. sufyan menjelaskan bahwa kelompok akseptor pria “Siwalan Mesra” aktif dalam melakukan sharing bersama dengan pelaksana KB dalam forum-forum dan pertemuan yang membahas tentang kegiatan MOP. Bahkan menurut kedua informan diatas, akseptor pria di kecamatan pakal memiliki tanggung jawab dan kemandirian dalam menyelenggarakan forum meskipun tanpa kehadiran PLKB.

Sementara itu, beberapa informan dari BKKBN, Bapemas Surabaya dan aparat kecamatan mengungkapkan adanya peran dari masyarakat kecamatan pakal diluar perencanaan MOP yaitu pelaksanaan MOP. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Sufyan :

“ ya, disini saya melihat memang yang aktif pada petugas-petugas lapangan disana kader KB dan juga kelompok KB prianya itu bersinergi bersama bagus sekali kerjasamanya. Ini mereka menyebarkan informasi yang sangat massive gitu, masyarakat banyak yang tau akhirnya oh ternyata KB pria seperti ini. Ya jadi peran-peran mereka penting, tapi masyarakatnya sendiri mungkin apabila tidak dikasih informasi seperti itu mungkin ya nggak akan tau mereka”

Drs. Djunianto juga menjelaskan hal yang sama :

“kelompoknya pak harto itu penting ya disana, saya liat disana juga meskipun sedang tidak ada PLKB mereka juga ndak pusing kumpul bareng bapak-bapak yang lainnya yang punya kesempatan untuk berkumpul untuk merencanakan sebuah aksi turun ke pasar misalnya, atau ke terminal itu mereka yang bikin acara ya saya rasa itu sudah bentuk kemandirian mereka”

Menurut Dr sufyan dan Drs. Djunianto, kader KB pria di kecamatan pakal cukup aktif bekerjasama dengan PLKB dalam pengembangan program kontrasepsi MOP disana. Menurutnya, pria di kecamatan pakal memiliki peran penting dalam menyebarkan dan mensosialisasikan tentang program MOP. Bahkan menurut Drs. Djunianto, sudah terdapat kemandirian di antara kader pria untuk merencanakan dan mensosialisasikan MOP secara mandiri tanpa bantuan bapemas dan BKKBN.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan :

“kalo penyuluhan itu bisa formal, misalnya kita undang disini ya biasanya. Tapi bisa juga secara informal. Ini biasanya para kader turun ke bawah langsung, langsung mencari. Ya salah satunya dengan sosialisasi, grebeg pasar, grebeg terminal. Dia itu pendekatan-pendekatan kekeluargaan. Jadi ya

biasanya para kader ini orang yang udah deket dan udah dikenal oleh warga jadi paling nggak bisa mempengaruhi. Ya paling ndak itu orang yang sregep gitu loh. Jadi ndak ada kesibukan lain gitu lho. Jadi bisa sering turun, sering keliling gitu biasanya ada apa grebeg gitu misalnya. Ya paling ndak bisa ngerayu gitu secara halus. Jadi kuncinya satu ya, sering keluar sering keliling gitu. Nggak terjadwal tapi sering turun”

Agus juga menambahkan, bahwa kader pria di kecamatan pakal cukup banyak melakukan sosialisasi dengan pendekatan kekeluargaan kepada sesama pria. muji juga menjelaskan hal yang sama tentang peran kader pria dalam sosialisasi MOP :

“oh iya, jelas penuh dan aktif mbak. Saiki kader sembarang iki ngirim mbak, rono kader, berangkat oke gitu loh mbak. Berarti yo jelas jiwa sosialnya itu ya tinggi, kalo jiwa social ndak tinggi yo berarti nggerundel. Terus disamping itu kerjasamanya juga bagus”

Bahkan menurut Toni, sosialisasi yang dilakukan secara mandiri oleh akseptor/kader pria, sekarang sudah dilakukan diluar kecamatan pakal yaitu di kecamatan-kacamatan lain di Surabaya :

“sekarang itu namanya paguyuban itu sekarang sudah diundang di kecamatan-kecamatan yang lain untuk melakukan sosialisasi bagaimana MOP itu. Bahkan nanti ini tanggal 22 itu lima hari diundang kesini. Dan bapemas akan mengundang seluruh jajaran peserta MOP beserta calon peserta MOP dianjurkan kesini pak harto akan memberikan sosialisasi”

Jadi berdasarkan beberapa penjelasan akseptor diatas, akseptor pria di kecamatan pakal cukup banyak memiliki peran terhadap program KB khususnya MOP di kecamatan pakal. Peran yang ditunjukkan akseptor pria dalam program MOP ini diwujudkan dalam perencanaan MOP maupun dalam pelaksanaan MOP. Di dalam forum yang membahas tentang perencanaan kegiatan, akseptor pria berperan sebagai partner dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan

perencanaan kegiatan MOP. Di dalam forum tersebut, akseptor pria dengan PLKB saling berbagi pengetahuan dan bertukar opini dalam menentukan sebuah keputusan. Sama halnya dengan pelaksanaan MOP, akseptor pria berperan sebagai partner dalam sosialisasi MOP di kecamatan pakal. Dalam konteks ini, pria mampu bergerak untuk mengagendakan pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan MOP secara mandiri. Hal ini menunjukkan adanya peran akseptor pria yang setara bahkan lebih besar daripada pihak instansi pelaksana KB dalam pelaksanaan MOP.

## **III.2 Analisis Data dan Interpretasi Teoritik**

### **III.2.1 Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pakal**

Penduduk adalah salah satu aset penting pembangunan suatu negara. Dikatakan demikian karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan suatu negara. Suatu negara dengan pembangunan yang sehat dan seimbang, memiliki jumlah dan kapasitas penduduk dalam jumlah yang seimbang pula dalam segi kuantitas dan kualitas. Maka sudah menjadi konsekuensi logis apabila kualitas dan kuantitas penduduk yang tidak seimbang akan membuat pembangunan suatu negara menjadi terbelakang.

Pemerintah sebagai aktor penggerak pembangunan memiliki fungsi sebagai fasilitator, katalisator sekaligus regulator dimana pemerintah berperan membuat kebijakan, mengarahkan dan memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian dan perkembangan kependudukan. Sebagai wujud dari tanggung jawab

atas jumlah penduduk di Indonesia, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Keluarga Berencana.

Sejauh ini, Program Keluarga Berencana yang telah direalisasikan sejak kurang lebih empat dekade yang lalu ini dimaknai sebagai program pemerintah yang mengatur setiap keluarga untuk menggunakan kontrasepsi agar jumlah anak dalam setiap keluarga akan terkendali. Dengan harapan, dalam kondisi yang lebih luas lagi akan berdampak pada terkendalinya jumlah penduduk Indonesia.

Keluarga Berencana (KB) adalah program dan kebijakan pemerintah yang dijalankan sejak tahun 1968 untuk mengendalikan jumlah penduduk. Menurut peraturan terbaru yaitu Undang Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Program Keluarga Berencana berarti upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Sedangkan definisi lain mengatakan keluarga berencana adalah :

“..... upaya untuk merencanakan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak dalam rangka mencapai tujuan reproduksi keluarga” (Lembaga demografi FEUI, 2010:176).”

“..... tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang saat diinginkan, mengatur interval antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungannya dengan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga.” (WHO (World Health Organization) expert Commite 1970)

“Keluarga berencana (*family planning/planned parenthood*) merupakan suatu usaha menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi.”(Sulistyawati, 2012:13)

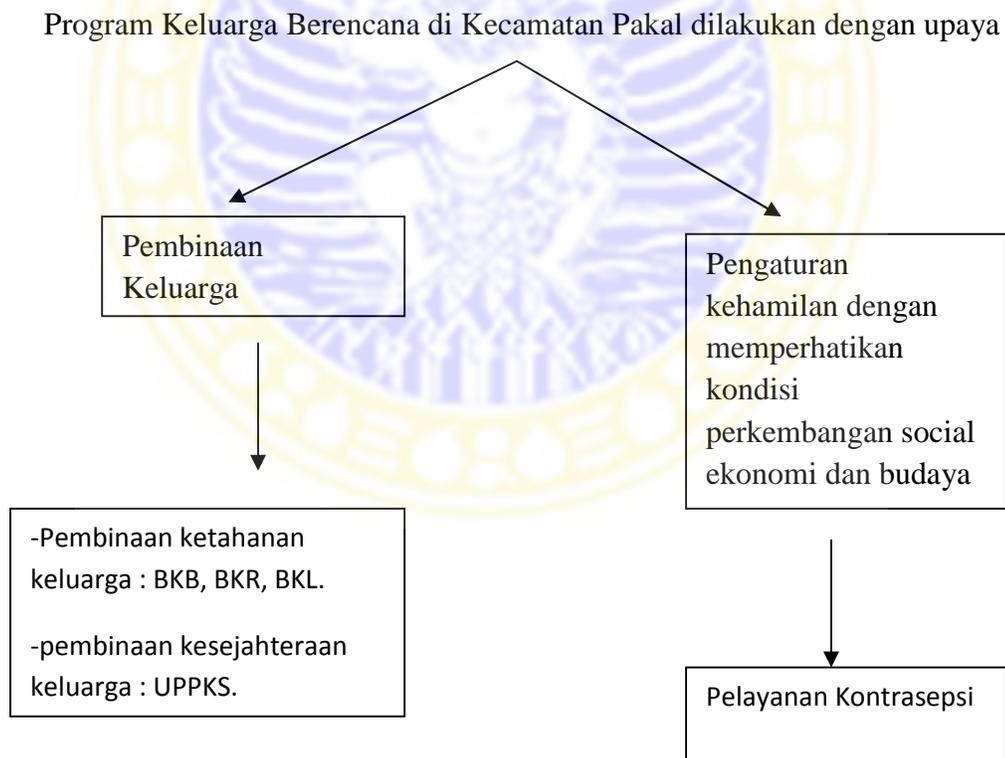
“Alat/cara keluarga berencana (kontrasepsi) adalah alat/cara yang digunakan oleh pasangan usia subur untuk mengatur jarak kelahiran atau untuk membatasi jumlah kelahiran yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kehamilan (konsepsi).” (Lembaga demografi FEUI, 2010:176).

Program KB, sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan memiliki implikasi yang sangat tinggi terhadap pembangunan kesehatan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu, program KB memiliki posisi strategis dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran dan pendewasaan usia perkawinan (secara kuantitatif), maupun pembinaan ketahanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga (secara kualitatif) dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, sehingga memungkinkan program dan gerakan KB diposisikan sebagai bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi. Tujuan yang ingin dicapai, bukan lagi hanya bertumpu pada aspek demografis (kuantitatif), tetapi lebih ditekankan pada peningkatan pada peningkatan kualitas hidup individu (kualitatif) (Suratun, 2008:20).

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, kecamatan pakal telah melaksanakan program KB sesuai dengan amanat Undang Undang No 52 tahun 2009 yang mengatur adanya pelaksanaan Keluarga Berencana secara menyeluruh mulai dari penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, pembinaan ketahanan keluarga dan pembinaan kesejahteraan keluarga. Pelaksana KB yaitu Bapemas KB Surabaya dan

PLKB telah menjalankan amanat undang undang tersebut di kecamatan pakal dengan tertib dan merujuk pada amanat undang-undang tersebut. Penyelenggaraan kontrasepsi di kecamatan pakal diselenggarakan secara menyeluruh dan rutin mulai dari MOP, MOW, Kondom, IUD, Implan dan Suntik. Sedangkan pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

**Gambar 3.2 Jabaran Program KB di Kecamatan Pakal**



Di samping itu, pemaknaan program KB di masyarakat juga cukup memadai. Dalam arti, mereka memberikan pemahaman yang hampir sesuai dengan makna yang

tertulis dalam undang undang. Kelima informan yang berhasil dimintai keterangan oleh peneliti memaknai program KB sebagai program jangka panjang dengan tujuan mengendalikan jumlah anak dalam keluarga yang dengan begitu akan berdampak pada terkendalinya penduduk Indonesia. Informan juga memahami program KB merupakan program yang diselenggarakan untuk menyejahterakan masyarakat dalam hal ekonomi dan social dari program-program pembinaan keluarga yang tercakup dalam program KB.

Program KB di Kecamatan Pakal telah disosialisasikan dan diperkenalkan ke masyarakat sejak awal diselenggarakannya program KB di Surabaya yaitu tahun 1998. Namun pada tahun 2010 kecamatan pakal mulai mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal pelaksanaan program kontrasepsi MOP. Antusiasme pria dalam program MOP di kecamatan pakal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan informan dan data yang menunjukkan peningkatan partisipasi pria dalam kontrasepsi MOP di kecamatan pakal dari tahun. Capaian target peserta MOP semakin meningkat dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2010 yaitu sebanyak 17 pria, 2011 sebanyak 25 pria, 2012 sebanyak 126 pria dan 2013 sebanyak 85 pria. sehingga dengan begitu, program MOP merupakan focus utama yang sedang dikembangkan di kecamatan pakal karena tingginya minat dan keikutsertaan pria.

### III.2.2 Partisipasi Pria dalam Program KB di Kecamatan Pakal

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan merupakan syarat utama prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang sedang dijalankan di Indonesia saat ini. Masyarakat dituntut untuk ambil peran dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses pembangunan baik dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan evaluasi program. Prinsip ini bila dijalankan secara konsisten akan menciptakan suatu bentuk pemerintahan yang ideal.

Banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang definisi partisipasi. Namun secara harfiah partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik secara alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan” (Sugandi, 2011:184)

Partisipasi menurut Hoofstede 1971 (dalam Sugandi 2011:183) berarti “*the taking part in one more phases of the process*” atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dalam proses, dalam hal ini proses pembangunan. Partisipasi adalah pokok utama dalam pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya

mungkin dicapai apabila masyarakat itu sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. (Fithriadi dkk dalam Sugandi, 2011:183). Dengan demikian, adanya demokrasi yang partisipatoris pemerintahan menjadi lebih adil dan akuntabel.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mencoba menginterpretasikan konsep partisipasi dalam ranah penelitian yang berkaitan dengan program KB di kecamatan pakal. Seperti yang telah diuraikan di sub-bab sebelumnya, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah keterlibatan pria dalam program KB di kecamatan pakal. Hal ini menjadi urgensi penelitian karena sesuai dengan latar belakang masalah penelitian ini, yaitu adanya data yang menunjukkan bahwa keikutsertaan pria dalam program KB di kecamatan pakal cukup baik bila dilihat dari segi kuantitas pria yang ikut serta dalam kegiatan kontrasepsi.

Ditinjau secara historis, keikutsertaan pria di kecamatan pakal dalam pelayanan kontrasepsi MOP dimulai pada tahun 2010. Berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan adanya peningkatan jumlah partisipan MOP yang signifikan pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya tokoh penggerak yang menjadi akseptor yang bernama Suharto yang berdasar pada pengalamannya secara aktif mengajak pria lain di kecamatan pakal secara sukarela mengikuti MOP. Pada akhir tahun 2010 jumlah akseptor KB pria MOP mencapai 17 orang, tahun 2011 sebanyak 25 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 126 orang. Kenaikan jumlah partisipan MOP di

kecamatan pakal dari tahun ke tahun juga disebabkan oleh adanya partisipasi dan sosialisasi oleh kader KB pria dari kelompok KB pria “Siwalan Mesra” yang terbentuk pada tahun 2011.

Berdasarkan hasil penelitian yang juga melibatkan anggota paguyuban “Siwalan Mesra” sebagai informan penelitian dan juga pihak pelaksana KB dari BKKBN Jawa Timur dan bapemas KB Surabaya, dapat digambarkan partisipasi akseptor KB pria dalam program KB cukup baik. Kelima informan KB yang telah menjadi akseptor sekaligus kader KB mengungkapkan alasannya untuk ikut dan terlibat menjadi akseptor MOP. Diantaranya adalah alasan untuk mencapai kesejahteraan dengan jumlah keluarga yang cukup dan tanggung jawab sebagai lelaki untuk ikut serta merencanakan keluarga.

Keterlibatan mereka dalam kegiatan KB di kecamatan pakal cukup holistik. Sesuai dengan teori milik Hoofstede 1971 (dalam Sugandi 2011:183), yang mengungkapkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi, maka partisipasi pria dalam program KB di kecamatan pakal telah merepresentasikan teori tersebut. Keterlibatan pria dalam program KB di kecamatan pakal diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kontrasepsi MOP, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Pada awalnya, partisipasi pria dimulai dari keikutsertaannya dalam kontrasepsi MOP. Selanjutnya, pria yang telah menjadi akseptor terlibat dalam kelompok paguyuban akseptor pria yang juga berpartisipasi dalam proses sosialisasi

MOP. Dalam proses sosialisasi MOP ini, akseptor pria terlibat mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan sosialisasinya. Sosialisasi ini mereka lakukan secara personal maupun bersama untuk menjaring calon akseptor.

Berdasarkan analisis mengenai partisipasi pria dalam program KB tersebut, sangat dimungkinkan adanya hambatan dan kendala dalam keikutsertaan mereka. Data menunjukkan adanya kendala yang mereka hadapi dalam berpartisipasi dalam program MOP maupun dalam upaya pelaksanaan sosialisasinya. Hambatan tersebut datang dari dalam (intern) dan dari luar (ekstern). Factor internal berasal dari dalam diri pria sendiri yaitu rasa takut untuk menggunakan kontrasepsi. Rasa takut pria ini menjadi kendala akseptor KB pria yang mensosialisasikan MOP kepada calon akseptor MOP di kecamatan pakal. Selain factor internal ada juga factor eksternal yaitu yang berasal dari luar pria itu sendiri yaitu keengganan istrinya untuk mengijinkan suaminya menggunakan kontrasepsi.

### **III.2.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Pria dalam Program KB di Kecamatan Pakal**

Berubahnya paradigma pembangunan ke arah *good governance* memunculkan suatu asumsi tentang perlunya peran dan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Prinsip inilah yang sedang dijalankan saat ini dengan tujuan mencapai suatu bentuk pemerintahan yang partisipatif, ideal dan sesuai dengan yang dicita-citakan banyak orang. Dalam *good governance*, aspek partisipasi dituntut untuk

dilaksanakan secara langsung dari masyarakat kepada pemerintah tanpa melalui perantara seperti dewan perwakilan atau partai politik.

Implikasinya, adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan memunculkan suatu bentuk interaksi secara langsung antara pemerintah dan masyarakat. Bentuk interaksi masyarakat dengan pemerintah dapat diwujudkan ketika mereka dipertemukan dalam sebuah forum kegiatan.

Dalam teori milik Syahyuti (2006) tentang bentuk-bentuk partisipasi, disebutkan ada enam bentuk partisipasi masyarakat local dalam suatu program pembangunan yaitu :

- Co-option : tidak ada input apapun dari masyarakat local yang dijadikan bahan subjek
- Co-operation : terdapat insentif, namun proyek telah didesain oleh pihak luar yang menentukan seluruh agenda dan proses secara langsung Employees atau subordinat
- Consultation : opini masyarakat ditanya, namun pihak luar menganalisis informasi sekaligus memutuskan bentuk aksinya sendiri Clients
- Collaboration : masyarakat local bekerjasama dengan pihak luar untuk menentukan prioritas , dan pihak luar bertanggungjawab langsung kepada proses Collaborators

- Co-learning : masyarakat local dan luar saling membagi pengetahuannya, untuk memperoleh saling pengertian, dan bekerjasama untuk merencanakan aksi, sementara pihak luar hanya memfasilitasi Partners
- Collective action : masyarakat local menyusun dan melaksanakan agendanya sendiri (Sugandi, 2011:185)

Agar konsep bentuk partisipasi menurut Syahyuti di atas dapat dengan mudah diubah menjadi pertanyaan penelitian dan lebih memudahkan dalam interpretasinya maka peneliti memetakan beberapa teori tersebut ke dalam bentuk tabel seperti berikut :

**Tabel 3.2 Tabel Bentuk Partisipasi (Syahyuti, 2006)**

BENTUK PARTISIPASI	BENTUK INTERAKSI/KERJASAMA	PENYUSUNAN AGENDA/KEGIATAN PENENTUAN AKSI/TINDAKAN	PERAN MASYARAKAT LOKAL
Co-option	Tidak ada input dari masyarakat local	Murni dari pihak luar	Hanya sebagai objek
Cooperation	Ada insentif/pengupahan/honor	Proyek didesain oleh pihak luar yang menentukan seluruh agenda dan proses secara langsung	Employees/subordinat/masyarakat local berperan sebagai bawahan yang bekerja untuk kepentingan kompensasi honor/insentif
Consultation	Ada input, opini masyarakat ditanya	Pihak luar yang menganalisis informasi dan tindakan/	Clients/masyarakat local berperan sebagai klien yang membeli atau menerima

		sekaligus menentukan bentuk aksinya	produk/pelayanan/peran masyarakat masih dalam posisi pasif
Collaboration	Masyarakat dan pihak luar bekerjasama menentukan prioritas, pihak luar bertanggung jawab terhadap proses	Masyarakat local dan pihak luar Saling bekerjasama menentukan agenda	Collaborators/posisi masyarakat local sejajar dengan pihak pelaksana untuk pencapaian tujuan bersama
Co-learning	Masyarakat dan pihak luar saling membagi pengetahuan untuk memperoleh saling pengertian	Pihak luar dan masyarakat local bekerjasama untuk merencanakan aksi sementara pihak luar hanya memfasilitasi	Partners/ pihak luar dan masyarakat local saling berbagi kepentingan bersama/berpartisipasi dalam pencapaian tujuan bersama/ posisi masyarakat local lebih tinggi daripada pihak pelaksana
Collective action	Hanya masyarakat yang bertindak penuh tanpa ada campur tangan pihak luar	Masyarakat local menyusun dan melaksanakan agendanya sendiri	Directors/ masyarakat local berperan penuh dalam program termasuk mengawasi, mengontrol dan mengatur segalanya

Berdasarkan pemetaan teori milik syahyuti tersebut, peneliti memetakan bentuk partisipasi pria menjadi tiga indikator yaitu bentuk interaksi, aktor penyusun dan penentu aksi/agenda/tindakan, dan peran masyarakat local. Pada indikator bentuk interaksi, peneliti mengidentifikasi tentang bentuk dan pola dari interaksi antara partisipan dengan pihak pelaksana KB. Pada indicator penyusunan agenda kegiatan dan penentuan aksi/tindakan, Peneliti mencoba mencari informasi tentang aktor yang menjadi tokoh pengambil keputusan dalam segala bentuk kegiatan KB seperti penentuan agenda, aksi dan sosialisasi. Sedangkan pada indicator peran masyarakat

local, peneliti mencari informasi tentang peran masyarakat local (dalam hal ini akseptor pria) dalam kegiatan KB di kecamatan pakal.

Berdasarkan pertanyaan wawancara penelitian tentang bentuk interaksi pria dalam pelayanan kontrasepsi ditemukan adanya hubungan yang didasari oleh imbalan/insentif. Informan memberikan keterangan tentang adanya imbalan dan kompensasi sebesar seratus ribu rupiah bagi pria calon akseptor MOP dan pria yang menemukan calon akseptor MOP. Di samping kompensasi berupa uang tunai untuk kegiatan pelayanan kontrasepsi, ada juga kompensasi berupa uang lelah atau uang transport bagi motivator atau kader yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi MOP.

Selain adanya insentif untuk kegiatan pelayanan kontrasepsi, terdapat juga *reward* yang diberikan kepada paguyuban KB pria “Siwalan Mesra” atas keterlibatannya mensosialisasikan dan menyukseskan program KB pria MOP di kecamatan pakal. *Reward* ini diberikan kepada kelompok akseptor pria yang tergabung dalam paguyuban dalam bentuk uang tunai untuk kegiatan yang berkaitan dengan MOP.

Dari uraian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat keikutsertaan yang didasari oleh adanya kompensasi/insentif dalam suatu kegiatan oleh akseptor pria dalam program KB. Hal ini ditunjukkan oleh adanya insentif dalam pelaksanaan dan sosialisasi kontrasepsi MOP di kecamatan pakal. Dalam teori milik Syahyuti, bentuk keikutsertaan ini termasuk dalam kategori Cooperation. Dimana masyarakat local

terlibat dalam suatu kegiatan karena alasan kompensasi/insentif yang diberikan oleh pihak pemerintah/pelaksana program KB. Dalam pelaksanaan kontrasepsi, masyarakat local dalam hal ini akseptor pria bekerja sebagai bawahan untuk pelaksana program KB dalam kepentingan untuk memperoleh honor/upah. Bentuk partisipasi Cooperation juga ditunjukkan oleh adanya keterangan yang didapat bahwasannya pelaksanaan pelayanan kontrasepsi murni didesain oleh pihak BKKBN dan Bapemas KB selaku pihak pelaksana program KB.

Selain itu, di luar kegiatan pelayanan kontrasepsi akseptor pria terlibat dalam kegiatan KB lain yang berkaitan dengan MOP. Yaitu adanya hubungan yang interaktif antara akseptor pria dengan PLKB di kecamatan pakal. Interaksi antara PLKB dengan Akseptor pria terjadi di luar pelaksanaan pelayanan kontrasepsi yaitu ketika ada forum perencanaan kegiatan. Pertemuan tersebut dilakukan setiap bulan dalam rangka perencanaan pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan MOP.

Dari interaksi tersebut tercipta suatu pola hubungan antara akseptor pria yang aktif tergabung dalam paguyuban KB “Siwalan Mesra” dengan PLKB di kecamatan pakal. Menurut penjelasan informan, di dalam interaksi antara mereka terjadi secara simultan dan bersifat dua arah. Ada komunikasi dan pertukaran pendapat yang bersifat dua arah antara PLKB dengan akseptor pria yang memungkinkan terjadinya pertukaran pendapat, gagasan dan pandangan dalam memecahkan masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan program KB MOP.

Di samping terdapat hubungan yang intens antara akseptor pria dengan PLKB, dalam hal penyusunan agenda akseptor pria juga memiliki fungsi dan perannya terkait dengan program KB khususnya MOP. Hasil wawancara dengan informan penelitian pada indikator kedua, yaitu aktor atau pelaku pengambil keputusan dan penentu aksi/tindakan, menggambarkan bahwa akseptor pria dilibatkan secara penuh dalam penyusunan agenda kegiatan yang berkaitan dengan KB seperti sosialisasi dan pelaksanaan MOP. Dalam hal ini informan mengaku kerjasama mereka terkait dengan penyusunan jadwal, lokasi dan seluruh detail agenda sosialisasi MOP dan pelaksanaan MOP.

Dalam proses tersebut informan mengutarakan pendapat yang hampir sama mengenai adanya peran akseptor pria dalam penyusunan agenda kegiatan. Dalam setiap pertemuan yang membahas tentang perencanaan kegiatan MOP, baik sosialisasi maupun pelaksanaannya, terdapat kerjasama dan pertukaran opini antara PLKB dan akseptor pria. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan dari kedua pihak, yaitu pihak akseptor/kader KB pria dan juga dengan pihak pelaksana KB yaitu PLKB, Aparat Kecamatan, Bapemas KB dan BKKBN, yang menunjukkan adanya keseragaman jawaban bahwa dalam hal penyusunan agenda kegiatan mereka lakukan secara bersama dan melibatkan satu sama lain dalam pengambilan keputusannya.

Namun pada penentuan aksi/tindakannya terdapat kemandirian dari akseptor pria dalam menentukan hal tersebut. Dapat dikatakan, pihak pelaksana atau PLKB

lebih banyak menyerahkan urusan mengenai MOP kepada akseptor pria dan pihak pelaksana seperti PLKB dan Bapemas hanya sebatas memfasilitasi kebutuhan saja. Hal ini ditunjukkan oleh adanya jawaban dari informan yang mengutarakan bahwa akseptor pria menyusun dan menjadwalkan agendanya sendiri yang selanjutnya menghubungi pihak pelaksana. Dan pihak pelaksana dalam hal ini hanya sebagai fasilitator bagi kebutuhan akseptor pria dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam program KB.

Sesuai dengan penjelasan mengenai keterlibatan akseptor pria di atas, dapat dikaitkan dengan teori milik Syahyuti yaitu tentang bentuk partisipasi Co-learning. Dimana partisipasi masyarakat local diwujudkan dengan cara ikut serta dalam perencanaan program dan terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dalam konsep bentuk partisipasi menurut syahyuti, konsep Co-learning ditunjukkan dengan adanya kerjasama dalam hal penyusunan agenda dan penentuan aksi atau tindakan dimana masyarakat saling bekerjasama dengan pihak pelaksana program dan masyarakat local diposisikan sebagai partner dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menggambarkan adanya kerjasama dan keterlibatan akseptor pria dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan MOP yaitu kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kontrasepsi MOP.

Di samping itu, bentuk partisipasi masyarakat Co-learning ditunjukkan oleh akseptor pria di kecamatan pakal dengan adanya kemandirian mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan MOP. Dalam hal ini

akseptor pria lebih memiliki peran dalam menentukan agenda kedepan dan pihak pelaksana KB yaitu Bapemas KB hanya bertindak sebagai fasilitator bagi kegiatan MOP di kecamatan pakal.

Pada indicator yang ketiga, peneliti berusaha menemukan informasi mengenai peran masyarakat local dalam program KB. Masyarakat local yang dimaksud dalam konteks ini adalah pria di kecamatan pakal yang telah bergabung menjadi akseptor sekaligus kader KB. Sesuai hasil penelitian, peran pria dalam program KB lebih banyak dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan MOP, mulai dari segi perencanaannya hingga pelaksanaannya. Dalam forum tersebut, akseptor pria memiliki fungsi dan peran dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan Sosialisasi MOP. Fungsi dan peran tersebut mereka wujudkan dengan menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam merumuskan kegiatan dan perencanaan program-program kerja yang berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan MOP di kecamatan pakal. Sehingga dapat dikatakan, peran akseptor pria dalam perencanaan kegiatan MOP adalah sebagai partner pelaksana KB dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan MOP. Sama halnya dengan pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan pelayanan MOP, akseptor pria bergerak secara nyata menyumbangkan tenaganya untuk bersosialisasi di tempat-tempat umum seperti terminal dan pasar. Peran pria dalam hal pelaksanaan juga sebagai partner Bapemas KB dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan pelayanan MOP.

Jadi berdasarkan beberapa penjelasan diatas, akseptor pria di kecamatan pakal cukup banyak memiliki peran terhadap program KB khususnya MOP di kecamatan pakal. Dapat dikatakan peran pria dalam konteks ini adalah partner pihak pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan KB khususnya MOP. Dalam teori milik syahyuti, Partners dalam bentuk partisipasi Co-learning dijabarkan sebagai kerjasama antara pihak luar dan masyarakat local yang saling berbagi kepentingan bersama dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan bersama. Namun, dalam pengertian partner, masyarakat local lebih banyak berperan dan bertindak aktif sementara pihak luar atau pelaksana hanya bertindak sebagai fasilitator saja.

Dalam konteks ini, masyarakat local yaitu akseptor pria saling bekerjasama dengan pihak pelaksana dalam hal ini BKKBN, Bapemas KB dan PLKB nya dalam menentukan tujuan bersama yaitu kesuksesan pencapaian MOP. Akseptor pria juga bertindak aktif dan mandiri dalam kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan MOP sehingga pihak pelaksana diposisikan hanya sebagai fasilitator saja, yaitu memfasilitasi kebutuhan dan pelaksanaan MOP di Kecamatan Pakal.